



**LAPORAN PENCAPAIAN
TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN (TPB) /
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024**

**BAPELITBANGDA
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dalam era desentralisasi saat ini, peran dan fungsi Pemerintah Daerah dalam membangun daerahnya cenderung semakin meningkat. Paradigma “membangun daerah” telah bergeser menjadi “daerah membangun”. Sejalan dengan itu, peran pemerintah daerah sebagai perencana, pelaksana dan pemantau pembangunan daerah juga semakin meningkat, sehingga kemampuan daerah untuk melakukan pemetaan dan pemotretan kondisi pembangunan daerah, terutama pada aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan manusia sangat penting untuk dilakukan.

Berkaitan dengan itu, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao berinisiatif membuat laporan ketercapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024. Laporan ini merupakan salah satu bentuk penerapan dan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan dan mensukseskan SDGs. Laporan ini memberikan informasi tentang TPB/SDGs itu sendiri dan kondisi capaian indikator-indikator yang terkait TPB/SDGs di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Tim Penyusun yang telah bekerja keras menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini dapat membantu kita semua khususnya Pemda Kabupaten Rote Ndao untuk mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Terima Kasih.

B. A. 1 November 2024
Kepala Bapelitbangda Kab. Rote Ndao



Diana A. Bullu, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19801209 200904 2 005

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	3
	1.3. Landasan Hukum	3
BAB II	RINGKASAN STATUS PENCAPAIAN TPB/ SDGs	5
	2.1. Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan	5
	2.2. Tujuan 2. Tanpa Kelaparan	11
	2.3. Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	16
	2.4. Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas	34
	2.5. Tujuan 5. Kesenjangan Gender	46
	2.6. Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	54
	2.7. Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau	60
	2.8. Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	62
	2.9. Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	70
	2.10. Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan	75
	2.11. Tujuan 11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	83
	2.12. Tujuan 12. Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	86
	2.13. Tujuan 13. Perubahan Iklim	89
	2.14. Tujuan 14. Ekosistem Laut	91
	2.15. Tujuan 15. Ekosistem Daratan	95
	2.16. Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh	101
	2.17. Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	112
	2.18. Analisis Pencapaian TPB/SDG's Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023	117
BAB III	PENUTUP	124
	3.1 Kesimpulan	124
	3.2 Rekomendasi	125

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal
Tabel 2.1	Tujuan Tanpa Kemiskinan	5
Tabel 2.2	Tujuan Tanpa Kelaparan	11
Tabel 2.3	Pravalensi Angka Stunting dan Malnutrisi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2023	14
Tabel 2.4	Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera	16
Tabel 2.5	Daftar Kolaborasi dan Keterlibatan Lintas Sektor dan Jaring Pengaman	33
Tabel 2.6	Pendidikan Berkualitas	36
Tabel 2.7	Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2023	38
Tabel 2.8	Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao, NTT dan Nasional Tahun 2020-2023	39
Tabel 2.9	Kesetaraan Gender	45
Tabel 2.10	Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	48
Tabel 2.11	Air Bersih dan Sanitasi Layak	54
Tabel 2.12	Energi Bersih dan Terjangkau	60
Tabel 2.13	Pembangunan PLTS Terpusat	60
Tabel 2.14	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	62
Tabel 2.15	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	71
Tabel 2.16	Kualitas Layanan Urusan Industri	74
Tabel 2.17	Berkurangnya Kesenjangan	75
Tabel 2.18	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	83
Tabel 2.19	Kualitas Pelayanan Urusan Perumahan dan Permukiman	84
Tabel 2.20	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	85
Tabel 2.21	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	86
Tabel 2.22	Kualitas Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup	88
Tabel 2.23	Perubahan Iklim	89
Tabel 2.24	Ekosistem Laut	91
Tabel 2.25	Ekosistem Daratan	95
Tabel 2.26	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	101
Tabel 2.27	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	112
Tabel 2.28	Capaian Indikator TPB di Kabupaten Rote Ndao	121

DAFTAR GRAFIK

Nomor	Judul	Hal
Grafik 2.1	Persentase Penduduk Miskin	8
Grafik 2.2	Tingkat Kemiskinan Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional	9
Grafik 2.3	Tren Kematian Ibu dan Kematian Bayi	22
Grafik 2.4	Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak	57
Grafik 2.5	Persentase RT Berakses Sanitasi Layak	58
Grafik 2.6	Laju Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK	65
Grafik 2.7	PDRB perkapita ADHB	66
Grafik 2.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	67
Grafik 2.9	PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	68
Grafik 2.10	Wisatawan Mancanegara	68
Grafik 2.11	Wisatawan Nusantara	69
Grafik 2.12	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	73
Grafik 2.13	Konsumen BPS yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik	114
Grafik 2.14	Konsumen BPS yang Menjadikan Data dan Informasi Statistik BPSD sebagai Rujukan Utama	114
Grafik 2.15	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	115
Grafik 2.16	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS	115
Grafik 2.17	Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	117
Grafik 2.18	Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional	118
Grafik 2.19	Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	118
Grafik 2.20	Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional	119
Grafik 2.21	Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang tidak atau belum ada data untuk target nasional	120
Grafik 2.22	Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang tidak atau belum ada data untuk target nasional	120

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Hal
Gambar 2.1	<i>Panic Button</i> pada Aplikasi Mama <i>Bo'i</i>	26
Gambar 2.2	<i>Panic Button</i> pada Aplikasi Mama <i>Bo'i</i>	27
Gambar 2.3	<i>Dashboard</i> Mama <i>Bo'i</i> untuk Pengambilan Keputusan Cepat bagi Pemangku Kepentingan	27
Gambar 2.4	Data Kohort Ibu Hamil yang Dientri oleh Bidan sebagai <i>user Aplikasi</i> Mama <i>Bo'i</i>	27
Gambar 2.5	Data Ibu Hamil yang akan Bersalin dalam 2 Minggu (<i>by name by address, by number</i>)	28
Gambar 2.6	Sebaran Data Ibu Hamil Menurut Kategori	28
Gambar 2.7	Pesan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan kepada Komunitas <i>Sio Sodak</i>	28
Gambar 2.8	Forum Mama <i>Bo'i</i> sebagai Wadah Pertukaran Informasi Antar <i>User</i> Mama <i>Bo'i</i>	29
Gambar 2.9	Pengiriman Pesan Hasil Analisis Aplikasi Mama <i>Bo'i</i> di Grup WhatsApp "Rote Bebas AKI/B"	30
Gambar 2.10	Informasi Kegawatdaruratan dan Penanganan Persalinan di Fasilitas Kesehatan oleh <i>Sio Sodak</i> di grup <i>WhatsApp</i> pimpinan	30
Gambar 2.11	Fitur <i>Analytics</i> Mama <i>Bo'i</i> yang Otomatis Menganalisis Data Hasil Entrian Ibu Hamil oleh <i>User</i> Mama <i>Bo'i</i> di <i>Desa/Kelurahan</i>	31
Gambar 2.12	Target Penurunan AKI/AKB Sesuai dengan Peta Jalan	32
Gambar 2.13	Dampak Sebelum dan Sesudah Inovasi Mama <i>Bo'i</i>	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global periode 2016-2030 yang menjadi agenda baru dalam meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium/*Millennium Development Goals* (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan MDGs yang belum tercapai. TPB/SDG's jauh lebih luas cakupannya dibandingkan dengan MDG's yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDG's terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah: Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Air Bersih dan Sanitasi Layak, Energi Bersih dan Terjangkau, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Industri, Inovasi dan Infrastruktur, Berkurangnya Kesenjangan, Kota dan Permukiman Berkelanjutan, Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Penanganan Perubahan Iklim, Ekosistem Lautan, Ekosistem Daratan, Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

SDG's Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Sejalan dengan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 yaitu: *Pertama*, Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas melalui sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender. *Kedua*, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat melalui sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan kesejahteraan sosial masyarakat, meningkatnya ekonomi unggulan daerah dan meningkatnya nilai investasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Ketiga*, Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup dan yang berkelanjutan melalui sasaran meningkatnya kualitas pembangunan

infrastruktur dan meningkatnya pengendalian dampak lingkungan dan pemanfaatan ruang. *Keempat*, Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik melalui sasaran terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif didukung oleh teknologi dan informasi, meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta ketahanan bencana dan meningkatnya kualitas pembangunan desa.

Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026, antara lain: Pembangunan manusia, Rata-rata lama sekolah, Usia Harapan Hidup, Balita Gizi Buruk, Kasus Kematian Ibu dan Bayi, Stunting, Kemiskinan, Gender, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, lingkungan, infrastruktur, gender, air bersih dan sanitasi, industri kecil dan menengah, pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan. Komitmen pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah, yang dicirikan salah satunya dengan meningkatnya proporsi belanja langsung dan memprioritaskan target-target SDGs yang memiliki daya ungkit untuk mengintegrasikan pencapaian target lainnya.

Di sisi lain Pemerintah Kabupaten Rote Ndao juga membangun dialog kebijakan dan komunikasi yang konstruktif dengan pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sebagai kesempatan bagi pemangku kepentingan di Kabupaten Rote Ndao baik di lingkup Organisasi Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, NGO, Filantropi maupun dunia usaha untuk mendiskusikan kebijakan publik dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan khususnya melalui upaya pencapaian SDGs, serta memberi masukan bagi penyusun kebijakan dalam rangka SDGs di daerah. Point penting dalam SDGs yang utama adalah pembangunan berbasis hak asasi diarahkan pada upaya memfasilitasi generasi sekarang sekaligus generasi yang akan datang yang setara, inklusif dan partisipatif dengan strategi pembangunan terintegrasi yang diperankan oleh berbagai pihak.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyusunan laporan tahunan TPB/SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga non pemerintah terutama terkait data capaian indikator, program/kegiatan yang mendukung capaian serta pembelajaran dari praktik baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun non Pemerintah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan Laporan TPB/SDG's Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 ini antara lain:

1. Tercapainya keselarasan indikator atau target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.
2. Menyelaraskan program-program dari seluruh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Kabupaten Rote Ndao dalam mendukung pencapaian TPB/SDG's.
3. Meningkatkan koordinasi lintas Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta kelompok filantropi lainnya.
4. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada periode selanjutnya.
5. Meningkatkan kontribusi Kabupaten Rote Ndao secara nyata dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional dan global.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum Laporan TPB/SDG's Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- e) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
- g) Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

BAB II

RINGKASAN STATUS PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN/ SDGs

2.1 TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tanpa Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2023:

Tabel 2.1 Tujuan Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 1 :						
Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun						
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur (%)	BPS	27,54	28,08	27,45	27,05
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (Jiwa)	Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao	78.847	68.474	90.957	119.804
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Dinas Sosial	10,90	6,52	19,60	4,26
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan	Dinas Sosial	51,90	38,39	48,64	42,96

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
	bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan (%)	Kabupaten Rote Ndao				
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao	24	61,34	58,82	58
1.4.1.(d)	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPR Kab. Rote Ndao	76,99	79,47	79,47	72,84
1.4.1.(e)	Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPR Kab. Rote Ndao	75,76	79,92	80,09	79,54
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. (%)	Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao	95,42	95,04	99,13	98,99
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/sederajat.	Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao	73,06	73,47	74,08	74,09
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Dinas Dukcapil Kab. Rote Ndao	82,33	75,54	82,96	98,86
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

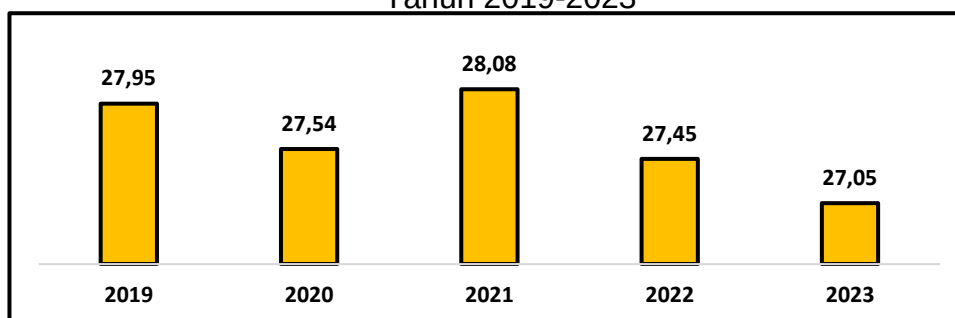
Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah (Kecamatan)	BPBD Kab. Rote Ndao	11	11	11	11
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. (%)	Dinas Sosial	100	91,49	88,30	100
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan (Miliar Rupiah)	Bapelitbang Kab. Rote Ndao	310	232	212	259
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BKA Kab. Rote NDao	Pendidikan : 20% Kesehatan:10%	Pendidikan : 20% Kesehatan:10%	Pendidikan : 20% Kesehatan:10%	Pendidikan : 20% Kesehatan:10%

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

Penduduk miskin di Kabupaten Rote Ndao masih cukup banyak, dengan tingkat penurunan kemiskinan yang belum signifikan dan fluktuatif. Berdasarkan data Statistik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Rote Ndao, persentase dan jumlah Penduduk Miskin Rote Ndao, Tahun 2019 sebesar 27,95 Persen atau 47.660 Jiwa. Tahun 2020 sebesar 27,54 Persen atau 48.770 Jiwa. Tahun 2021 sebesar 28,08 Persen atau 51.710 Jiwa. Tahun 2022 sebesar 27,45 Persen atau 52.430 Jiwa. Tahun 2023 sebesar 27,05 Persen atau 53.550 Jiwa, persentase kemiskinan ini tentunya masih lebih tinggi jika dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 dengan angka kemiskinan sebesar 19,96%, namun yang perlu mendapat perhatian yaitu capaian Penurunan Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2009-2023, Kabupaten Rote Ndao berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 7,04 Persen, di mana pada tahun 2009 angka kemiskinan sebesar 34,09 Persen menurun menjadi 27,05 Persen pada tahun 2023 berada di urutan keempat Kabupaten/Kota di NTT dalam pencapaian terbaik penurunan angka kemiskinan. Secara rinci persentase kemiskinan Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada grafik 2.1 berikut:

Grafik 2.1

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2019-2023

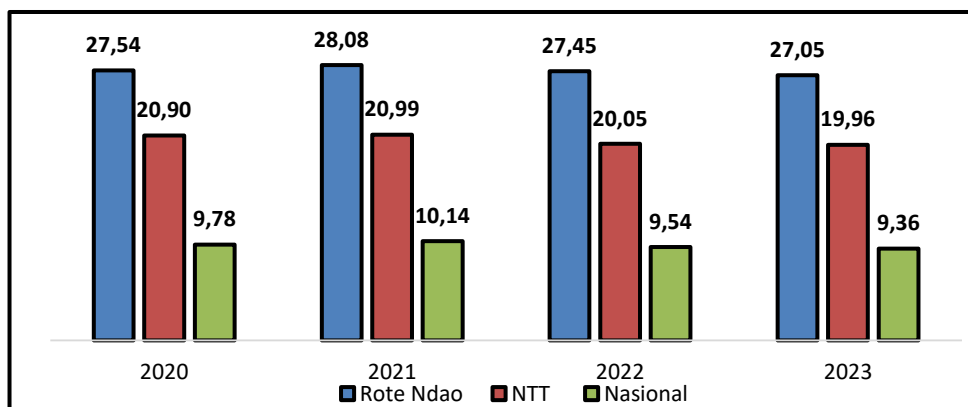


Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2023

Tingkat kemiskinan Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2023 sebesar 27,05 persen, lebih tinggi 7,09 persen dari persentase penduduk miskin Provinsi NTT sebesar 19,96 persen dan tertinggal 17,66 persen dari persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,39 persen. Secara rinci persentase

kemiskinan Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan Nasional dapat dilihat pada grafik 2.2 berikut:

Grafik 2.2
Tingkat Kemiskinan Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2023

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao dilakukan melalui: *Pertama*, pada tahun 2024 dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui Keputusan Bupati Rote Ndao Nomor 310 Tahun 2024 sebagai payung hukum dalam rangka integrasi dan kerjasama intens antara lembaga Pemerintah dan non Pemerintah. *Kedua*, Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dialokasikan melalui dana desa dan dana APBD I. *Ketiga*, Pembangunan rumah layak huni. *Keempat*, penajaman program kegiatan untuk menurunkan beban pengeluaran seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, subsidi dan bantuan sosial lainnya. Meningkatkan pendapatan melalui kegiatan pemberdayaan bagi kelompok usaha ekonomi produktif, bantuan sarana prasarana pertanian, peternakan dan perikanan. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui kegiatan pembangunan jalan, jembatan, embung, air bersih dan akses pelayanan dasar lainnya.

Perlu adanya implementasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang fokus sasarannya pada:

1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat, melalui:

Pemberian Program Keluarga Harapan (PKH), pemberian bantuan pangan non tunai, pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu, pemberian bantuan cadangan pangan bagi daerah rawan pangan dan pemberian bantuan Sosial bagi fakir miskin dan Pembangunan rumah layak huni.

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat, melalui:

Hibah dana pemberdayaan bagi kelompok usaha ekonomi produktif, Pelatihan tenaga kerja & bantuan pasca pelatihan (meubelair, menjahit dan mengelas), Pengembangan hijauan makanan ternak, Penyediaan perahu ketinting, Pengadaan alsintan (handtraktor, medium traktor dan mesin pompa air), Bantuan ternak sapi, Penyediaan air untuk pertanian (sumur bor dan sarana pendukung lainnya) dan Pembukaan lahan sawah baru

3. Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan, melalui:

Pembangunan & rehabilitasi jalan, Pembangunan & rehabilitasi Embung, Pengelolaan Pendidikan dasar dan menengah, Penyediaan sanitasi layak dan air bersih dan Penyediaan listrik

4. Sektor-sektor prioritas yang mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yaitu pertanian, peternakan dan perikanan, oleh karena itu sektor tersebut perlu mendapat porsi anggaran yang besar untuk pengadaan sarana prasarana pertanian dan perkebunan, sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap, pengadaan bibit ternak besar, sedang maupun kecil. Kedepannya pemerintah akan membuka lahan pertanian, peternakan dan perikanan terpadu sebagai *pilot project*.

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Selain upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi yang melibatkan lintas sektor, juga terdapat inovasi yang mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu Inovasi melalui Aplikasi Tulu Fali. Nama Aplikasi ini dalam Bahasa Rote Artinya Tolong Menolong, dengan kepanjangan yaitu TUjuan LUhur Fokus PenAngguLangan KemIskinan (TULU FALI).

Tujuan besar Aplikasi ini yaitu diperuntukan bagi upaya distribusi bantuan sosial yang adil dan merata dengan prioritas bagi Masyarakat Miskin Ekstrem di Kabupaten Rote Ndao.

Pembuatan Aplikasi Tulu Fali berpedoman pada Keputusan Bupati Nomor 322.a/KEP/HK/2022 Tentang Kriteria Penerima Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mengatasi Resiko Sosial yaitu:

1. Pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak terus menerus (tidak diberikan setiap tahun anggaran) dan dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan yaitu bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan terlepas dari resiko sosial.
2. Pemberian Bantuan Sosial memprioritaskan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem minimal 50 Persen.
3. Pemberian Bantuan Sosial berulang hanya diberikan kepada Kepala Keluarga yang sebelumnya tidak menyalahgunakan dan/atau lalai dalam memanfaatkan bantuan sosial pada tahun-tahun sebelumnya.
4. Kepala Keluarga yang telah menerima Bantuan Sosial dengan nilai di atas Rp. 50.000.000 baik dari bantuan sosial yang diterima dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan/atau melalui Dana Desa, tidak lagi diberikan bantuan sosial oleh pemerintah dalam bentuk apapun selama tahun berjalan kecuali kondisi gawat darurat diberikan kepada KK Miskin Ekstrem, Keluarga anggota Difabel, Gangguan Jiwa, Sakit Kronis dan Keluarga Lansia 65 Tahun ke atas.

2.2 TUJUAN 2: TANPA KELAPARAN

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tanpa Kelaparan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2023:

Tabel 2.2 Tujuan Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Baseline 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan						

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Baseline 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita.	e-PPGBM	24,0	24,6	27,2	29,31
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	e-PPGBM	25,8	23,4	22,3	20,46
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	e-PPGBM	19,1	18,6	17,4	14,3
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/ tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun,	Profil Kesehatan	11,03	11,54	9,52	10,8

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Baseline 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
	berdasarkan tipe.					
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	N/A	N/A	N/A	N/A	17,5
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Profil Kesehatan	73,2	80,3	63,58	58,99
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan(PPH) dan tingkat konsumsi ikan (Poin)	Dinas Pangan & Dinas Perikanan	56,40 50,70	76,90 51,00	89,30 53,5	56,4
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah umur lima tahun/balita di Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 sebesar 30,3% menurun menjadi 25,8% pada tahun 2020, tahun 2021 terus menunjukkan perbaikan menurun menjadi 23,4% dan tahun 2023 kembali mengalami penurunan mencapai mencapai 20,46%. Pengukuran ini menggunakan e-PPGBM (elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat), prevalensi stunting Ini menunjukan ada usaha dan kerja keras lintas sektor baik lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat dalam mengurangi angka balita stunting. Upaya percepatan penanganan dan penurunan angka stunting ini terus dilakukan agar generasi penerus pembangunan memiliki kesehatan, kecerdasan dan kreatifitas yang baik. Seluruh pemangku kepentingan secara

bersama-sama perlu melakukan upaya secara terpadu dan bersinergi sehingga diharapkan angka tersebut menurun sesuai target dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebesar 16% pada tahun 2024.

Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) pada anak usia di bawah 5 tahun (balita) berdasarkan tipe, pada tahun 2021 berada di angka 11,54%, mengalami peningkatan 0,51% dari 11,03% pada tahun 2020 dan pada tahun 2023 mengalami tren positif yaitu menurun menjadi 10,8%.

Berikut tabel persentase Angka Stunting dan Malnutrisi anak di Kabupaten Rote Ndao disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Pravalensi Angka Stunting dan Malnutrisi Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Pravalensi Balita Stunting (%)	25,83	23,48	22,27	20,46
Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	11,03	11,54	9,52	10,8

Sumber: e-PPGBM Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Tahun 2020-2023

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam menurunkan prevalensi stunting, yaitu:

1. Penguatan Kelas Parenting melalui penguatan Gerakan Kakak Angkat dan melalui lintas perangkat daerah.
2. Pemberian PMT berisi *snack* pangan lokal oleh Pemda Rote Ndao kepada 3011 anak stunting dan berisiko stunting di 119 desa/kelurahan selama 6 bulan dan pemberian PMT lokal melalui Kemenkes.
3. Menggalang dukungan FORKOPIMDA dalam berbagai upaya percepatan penurunan stunting.
4. Penguatan edukasi ASI eksklusif, MP-ASI dan PMBA secara terus-menerus dilakukan pada berbagai pertemuan kemasyarakatan.
5. Upaya percepatan penurunan stunting melalui revitalisasi budaya Rote.

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Untuk mengatasi penyebab stunting di atas, maka berikut beberapa intervensi/inovasi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yaitu:

1. Gerakan Kakak Angkat Adik Asuh

Untuk memperkuat Kelas Parenting bagi orang tua, diperlukan Gerakan Kakak Angkat. Gerakan ini melibatkan ASN dan non-ASN sebagai Kakak Angkat yang bertugas memantau layanan pada Bayi dua tahun stunting dan Ibu Hamil resiko tinggi.

2. Inovasi Mama Bo'i

Inovasi ini dilakukan untuk mencegah kematian ibu dan bayi dan menyasar pada kelompok ibu hamil risiko tinggi dan sangat tinggi. Salah satu indikator ibu hamil risiko tinggi adalah ibu Kurang Energi Kronik (KEK) yang turut diintervensi. Dampak ibu dengan KEK adalah anaknya stunting, sehingga inovasi Mama Bo'i ini juga turut berkontribusi terhadap penurunan angka stunting, selain mencegah kematian ibu dan bayi melalui inovasi ini seluruh kepala desa/lurah diharapkan mengetahui berapa jumlah ibu hamil di desa/kelurahannya.

3. Pemberian PMT berbasis pangan lokal

a) PMT lokal oleh 119 desa/kelurahan dengan menyasar seluruh Baduta. PMT ini diberikan selama 3 bulan.

b) PMT oleh Dinas P3AP2KB yang menyasar pada kelompok Baduta stunting *non wasting*, Baduta wasting non stunting, Baduta stunting dan *wasting* dan Baduta risiko stunting. PMT ini dilakukan di bulan November-Desember 2023

c) PMT oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas yang menyasar kelompok Balita wasting dan underweight di 119 desa/kelurahan.

4. Mekanisme Pemberian PMT bagi Balita Stunting dan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) Tahun 2023:

Penetapan Sasaran Penerima Bantuan dilakukan merujuk pada data e-PPBGM dari Tim Dinas Kesehatan yang masuk dalam kategori Baduta dan Balita *stunting* berdasarkan hasil penimbangan bulan Agustus Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 3011 anak dan Ibu Hamil yang tersebar di 11 Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao.

5. Metode Penyediaan PMT:

- a) Dinas Kesehatan melalui pengelola gizi/nutrisisionis mengeluarkan rekomendasi komposisi nilai gizi yang melengkapi kebutuhan gizi anak.
- b) PMT diolah oleh IKM yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PPK dengan memperhatikan kader dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tempat dan alur pengolahan menu yang sehat (Higienis).
- c) Uji coba atau demo menu oleh IKM harus dilakukan terlebih dahulu terhadap menu-menu yang akan diberikan kepada sasaran.
- d) Pengujian bahan produk di BPOM Kupang.
- e) PMT yang diberikan terdiri dari 5 (lima) varian yang meningkatkan selera makan sasaran sehingga habis dikonsumsi untuk siklus 5 (lima) hari makan dengan komposisi gizi yang telah dihitung (Tenaga Gizi/Tenaga Nutrisisionis) sesuai dengan kebutuhan gizi anak.
- f) PMT bergizi menggunakan bahan lokal berupa kelor, kacang hijau, abon ikan, madu, telur dan bahan lokal lainnya yang tinggi protein.

2.3 TUJUAN 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kehidupan Sehat dan Sejahtera Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2022:

Tabel 2.4 Tujuan Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Baseline 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia						
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	170,71	357,40	249,79	119,76
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang	Dinas Kesehatan Kabupate n Rote Ndao	66,99	83,45	63,16	69,20

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Baseline 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
	proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih					
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	66,99	74,29	62,00	69,20
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	6,83	1,07	9,16	19,56
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	14,68	15,73	9,16	12,77
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	19,46	18,94	11,66	15,97
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	0,12	0,19	0,30	0,31
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	22,54	14,92	35,17	44,76

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Baseline 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000orang.	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	0,93	0,31	1,77	0,32
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	Tidak ada POPM sejak tahun 2020	Tidak ada POPM sejak tahun 2020	Tidak ada POPM sejak tahun 2020	Filariasis: 0 kusta:11
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	N/A	N/A	18,49	20,11	23,11
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.4.2*	Angka kematian (<i>insidens rate</i>) akibat bunuh diri.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun)	Dinas P3AP2KB	86,41	79,05	47,00	47,00

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Baseline 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
	atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (%).					
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas P3AP2KB	86,41	79,05	47,00	47,00
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR) atau kelahiran hidup per	Dinas P3AP2KB	17	18	18	18

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Baseline 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
	1000 perempuan)					
3.7.2.(a)	<i>Total Fertility Rate (TFR).</i>	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	3,60	3,50	3,60	3,40
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau system kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	80,21	80,12	93,21	93,21
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN).	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	63,63	62,43	93,21	90,93
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	100	100	100	66,67
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	4,02	4,17	4,80	4,80

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

Salah satu indikator dalam menilai status kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan AKB bukanlah

sebatas indikator kesehatan ibu dan anak, melainkan menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, efisien dan efektivitas dalam pengelolaan program kesehatan.

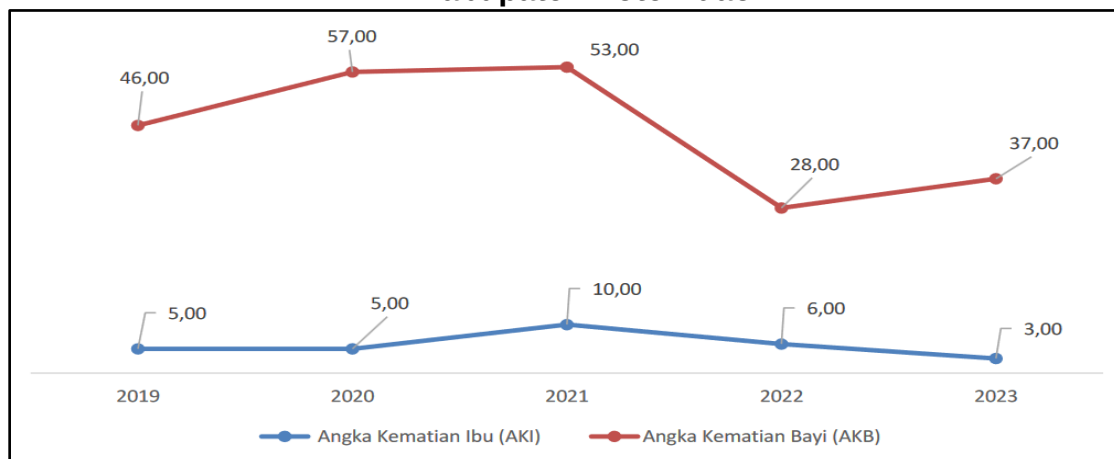
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan berbagai cara dilakukan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui fungsi Puskesmas pembantu, menempatkan tenaga bidan di Pustu, memperpanjang waktu pelayanan di Puskesmas Rawat Inap serta meningkatkan kualitas pelayanan. Khususnya untuk mengefektifkan pelayanan terhadap ibu hamil dan pada masa nifas. Dan juga kebijakan prioritas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil resiko tinggi. Faktor penyebab kematian bayi yaitu tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Semakin tinggi AKB di suatu wilayah dapat diartikan bahwa status kesehatan di wilayah tersebut masih relatif rendah. Kematian bayi pada umumnya disebabkan karena Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, Sepsis, Pneumonia, Diare, Observasi Febris, Syok Haemoragik dan Demam. Angka kematian ibu (AKI) yang terus meningkat terjadi di Kabupaten Rote Ndao disebabkan karena faktor pandemi COVID-19, status gizi, kesehatan perorangan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan bagi mereka serta masih rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Selain itu, akar penyebab kematian ibu adalah karena 3 Terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat ke fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kematian dan kesehatan pada bayi sangat terkait dengan imunisasi, status gizi, penyakit menular, kemiskinan dan juga fasilitas kesehatan yang tersedia. Disparitas cakupan pelayanan karena kendala geografis, sosial ekonomi dan klasifikasi tempat tinggal masih menjadi kendala secara nasional. Cakupan pelayanan selama persalinan dan pasca persalinan haruslah dapat menjangkau masyarakat miskin dan sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan sehingga diharapkan dapat mengurangi kematian bayi atau meningkatkan kelangsungan hidup bayi.

Pada Tahun 2023 angka kematian ibu melahirkan sebanyak 3 kasus dan kematian bayi sebanyak 37 kasus. Ini menunjukkan bahwa kematian bayi masih

perlu mendapat perhatian dari Pemerintah. Kematian Ibu dan Bayi dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.3
Tren Kematian Ibu dan Kematian Bayi Tahun 2019 – 2023
Di Kabupaten Rote Ndao



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao Tahun 2023

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa angka kematian bayi sebanyak 57 kasus lebih tinggi dari tahun 2021 yakni sebanyak 53 kasus. Pada tahun 2022 kasus kematian bayi menurun menjadi 28 kasus. Namun kasus kematian ini Kembali meningkat menjadi 37 kasus pada tahun 2023 Kasus kematian ibu tahun 2021 sebanyak 10 kasus dan pada tahun 2023 menurun menjadi 3 kasus. Hal tersebut terjadi tidak lepas dari peran Pemerintah dalam mendukung pelayanan kesehatan di masyarakat. Pemerintah terus melakukan inovasi salah satunya adalah aplikasi *Mama Bo'i* yang melibatkan sistem rujukan berbasis komunitas yang melibatkan 9 (sembilan) simpul jaring pengaman ibu: keluarga (suami, mama mantu, orang tua saksi), calon pendonor, kader (Posyandu, KPM), tokoh agama/masyarakat/pemuda/perempuan, kepala desa/lurah, camat, tenaga kesehatan (dokter, bidan, penyuluh kesehatan masyarakat), kepala Puskesmas, sekretariat *Mama Bo'i* (Dinas Kesehatan, Dinas P3AP2KB, Dinas PMD, Dinas Sosial, Bapelitbang).

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Beberapa kebijakan dan strategi dalam penanganan kematian Ibu dan Bayi, diantaranya:

1. Cegah kematian ibu dan bayi melalui penanganan 3T (3 Terlambat), yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat ke fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebagian besar kematian disebabkan oleh faktor terlambat mengambil keputusan di tingkat rumah tangga. Situasi pengambilan keputusan di tingkat rumah tangga dipengaruhi oleh 9 (sembilan) jaring pengaman ibu hamil, di antaranya: bidan, keluarga (suami, mama mantu, orang tua saksi), calon pendonor, kader (Posyandu, KPM), tokoh agama/masyarakat/pemuda/perempuan, kepala desa/lurah, camat, tenaga kesehatan (dokter, penyuluh kesehatan masyarakat), dan kepala Puskesmas. Penguatan jejaring ibu hamil dilakukan melalui pesan edukasi terhadap 9 jaring pengaman ibu hamil untuk mendukung persalinan ibu hamil di fasilitas kesehatan.
2. Pemasangan bendera KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
Pemasangan bendera ini dilakukan di setiap desa menurut 3 warna antara lain:
 - a) Warna hijau untuk kategori ibu hamil risiko rendah
 - b) Warna kuning untuk kategori ibu hamil risiko tinggi
 - c) Warna merah untuk kategori ibu hamil risiko sangat tinggiBendera KIA dipasang di depan setiap rumah ibu hamil untuk memudahkan masyarakat mengenali ibu hamil agar dapat selalu membantu saat dibutuhkan.
3. Pembentukan jejaring desa siaga
Desa siaga merupakan komunitas yang terbentuk di desa untuk membantu ibu hamil di desa mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan secara tepat waktu. Terdapat 5 jejaring desa siaga, antara lain:
 - a) Jejaring donor darah. Jejaring ini memungkinkan berbagai pihak di desa saling membantu untuk menjadi calon pendonor darah bilamana dibutuhkan oleh ibu hamil/ibu melahirkan.
 - b) Jejaring notifikasi. Jejaring ini memudahkan berbagai informasi kegawatdaruratan ibu hamil di desa dapat diakses oleh berbagai pihak desa siaga.

- c) Jejaring transportasi. Jejaring ini membantu ibu hamil dapat dirujuk secara cepat ke fasilitas kesehatan terdekat dengan menggunakan fasilitas transportasi di desa
 - d) Jejaring pos KB, dan Jejaring dana. Jejaring ini memudahkan ibu hamil yang kurang mampu mendapatkan bantuan finansial untuk mendukung proses persalinannya.
4. Kerjasama Pentahelix (akademisi, komunitas, media, bisnis, dan pemerintah). Beberapa hal yang sudah dilakukan dalam kolaborasi pentahelix di antaranya Kerjasama dengan lembaga mitra pemerintah yang fokus ke isu kesehatan ibu dan anak, yaitu Momentum USAID, kerjasama dengan tokoh agama dalam upaya penanganan stunting, kematian ibu dan bayi, kerjasama dengan media dalam meliput upaya pencegahan kematian ibu dan bayi.

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

1. Tujuan

Untuk dapat menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan efektivitas dalam pengelolaan program kesehatan serta mengetahui indikator kesehatan ibu dan anak, maka perlu diketahui angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pada tahun 2021 kematian ibu tercatat sebanyak 10 orang dan kematian bayi di Rote Ndao tercatat sebanyak 53 orang. Kasus kematian ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah terlambat pengambilan keputusan, terlambat merujuk ke fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tiga faktor terlambat di atas setelah dianalisis, maka didapati bahwa sebagian besar kasus kematian di Kabupaten Rote Ndao terjadi karena faktor keterlambatan pengambilan keputusan di tingkat akar rumput. Mengingat pentingnya peranan dari akar rumput terhadap pengambilan keputusan ibu hamil untuk dapat bersalin di fasilitas kesehatan serta pentingnya integrasi data layanan ibu dan bayi di Kabupaten Rote Ndao, maka dirumuskan Inovasi **Mama Bo'i** atau **Mama Tersayang**.

Inovasi ini di desain dengan tujuan untuk memastikan peran serta lintas sektor tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten untuk mendukung layanan ibu dan bayi termasuk pengambilan keputusan tingkat

keluarga sehingga ibu dapat bersalin di fasilitas kesehatan dan tidak pulang paksa. Peran aktif tersebut bertujuan untuk mencegah keterlambatan pengambilan keputusan serta mencegah kematian ibu dan bayi di Kabupaten Rote Ndao.

2. Keselarasan

Inovasi **Mama Bo'i** selaras dengan kategori Kesehatan dan Pelayanan Publik Responsif Gender. Namun kategori yang paling dominan adalah kategori Kesehatan karena inovasi **Mama Bo'i** mengacu pada inovasi layanan kesehatan bagi ibu dan bayi. Inovasi ini juga menyentuh langsung kebutuhan ibu dan bayi serta masyarakat akar rumput sebagai jaring pengaman ibu hamil. Berbagai layanan pada inovasi **Mama Bo'i** seperti pendataan ibu hamil, bayi baru lahir, dan lintas sektor dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai *user* **Mama Bo'i**. Selain itu, layanan **Mama Bo'i** diarahkan agar ibu hamil pada akhirnya dapat dirujuk dan bersalin di fasilitas kesehatan.

3. Signifikansi

Sebelum jumlah kematian ibu dan bayi pada tahun 2021 adalah yang tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir penerapan **Mama Bo'i** pelayanan terhadap ibu dan anak cenderung sektoral dan tidak terintegrasi. Selain itu, kasus pulang paksa masih banyak karena banyak ibu yang tidak mau bersalin di fasilitas kesehatan. Ibu hamil sering terlambat mengambil keputusan untuk bersalin karena pengambilan keputusan diambil oleh suami/keluarga/kader atau dukun.

Bertolak dari permasalahan di atas, maka dibutuhkan upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui suatu layanan terintegrasi yang dapat mencegah kasus pulang paksa dan mencegah keterlambatan pengambilan keputusan untuk bersalin di fasilitas kesehatan. Kita membutuhkan suatu layanan ibu dan bayi yang terintegrasi yang berbasis komunitas yang melibatkan peran aktif lintas sektor untuk mencegah kematian ibu dan bayi.

Mengatasi permasalahan di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao berkomitmen untuk mengeliminasi kematian ibu dan bayi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 21 Tahun 2020 tentang

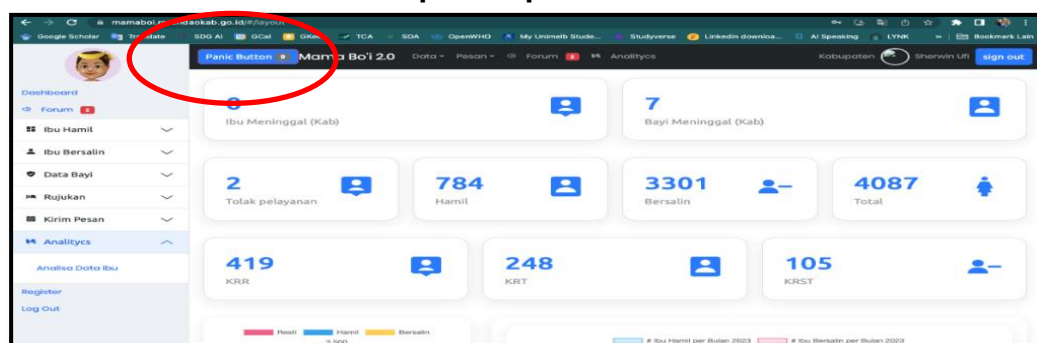
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Rote Ndao. Regulasi di atas menjadi dasar pijak untuk kerja sama lintas sektor sekaligus pembentukan inovasi **Mama Bo'i** sebagai sistem layanan rujukan terintegrasi berbasis komunitas di Kabupaten Rote Ndao.

4. Inovasi

Ada 3 (tiga) pilar penting dalam **Mama Bo'i**. **Pertama**, komitmen Kepala Daerah. **Kedua**, kolaborasi terpadu lintas sektor dengan jaring pengaman ibu hamil. Pemangku kepentingan di sini termasuk perangkat daerah terkait. Selain itu, terdapat 9 (sembilan) jaring pengaman ibu hamil yang terdiri dari suami, keluarga ibu hamil, kader desa, bidan, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, calon pendonor, kepala desa/lurah, dan camat. Kesembilan *safety net* diatas disebut **Sio Sodak**. Para *Sio Sodak* dan pemangku kepentingan inilah yang menjadi pengguna informasi yang dihasilkan oleh **Mama Bo'i**. **Ketiga**, penggunaan teknologi digital berupa aplikasi berbasis web dan media sosial (grup *WhatsApp*).

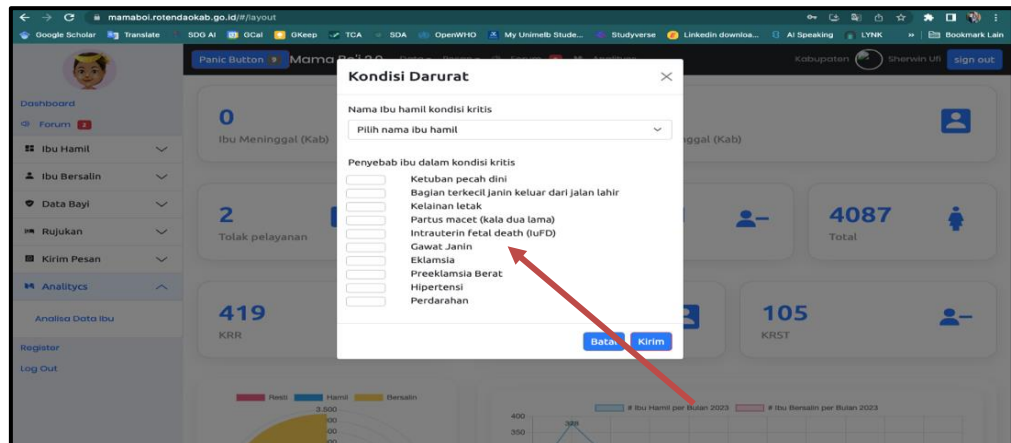
Terdapat 7 fitur utama pada web aplikasi **Mama Bo'i**, yaitu: Pertama, *panic button* dimana jika terjadi kasus gawat darurat, maka bidan dapat melapor ke *Sio Sodak*; Kedua, *dashboard* yang menampilkan data utama dan analisa data ibu hamil dan bayi; Ketiga, data kohort ibu hamil bagi bidan; Keempat, data **2M40H**, yaitu ibu hamil yang akan bersalin dalam 2 minggu dan data bayi baru lahir sampai usia 40 hari; Kelima, peta sebaran ibu hamil per desa; Keenam, fitur pesan kepada komunitas *Sio Sodak* untuk edukasi; dan Ketujuh, forum antar bidan untuk kepentingan komunikasi antar bidan. Satu-satunya fitur yang dimodifikasi adalah fitur ke-empat

Gambar 2.1
Fitur 1. Panic Button pada Aplikasi Mama Bo'i



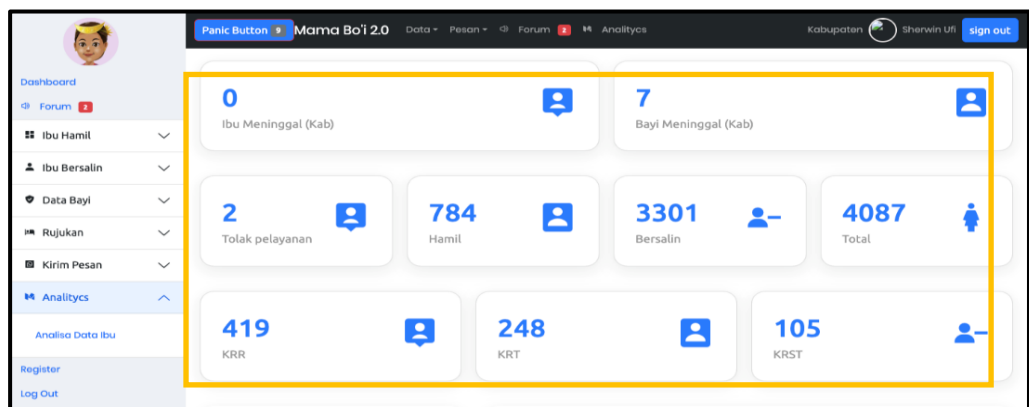
Sumber: <https://mamaboi.rotendaokab.go.id/> Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, 2023

Gambar 2.2
Fitur 1. *Panic Button* pada Aplikasi Mama Bo'i (bagian 2)



Sumber: <https://mamaboi.rotendaokab.go.id/> Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, 2023.

Gambar 2.3
Fitur 2. *Dashboard* Mama Bo'i untuk Pengambilan Keputusan Cepat bagi Pemangku Kepentingan



Sumber: <https://mamaboi.rotendaokab.go.id/> Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, 2023

Gambar 2.4
Fitur 3. Data Kohort Ibu Hamil yang Dientri oleh Bidan sebagai *user* Aplikasi Mama Bo'i

Sumber: <https://mamaboi.rotendaokab.go.id/> Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, 2023

Gambar 2.5
Fitur 4. Data Ibu Hamil yang akan Bersalin dalam 2 Minggu
(by name by address, by number)

Ibu Hamil Puskesmas

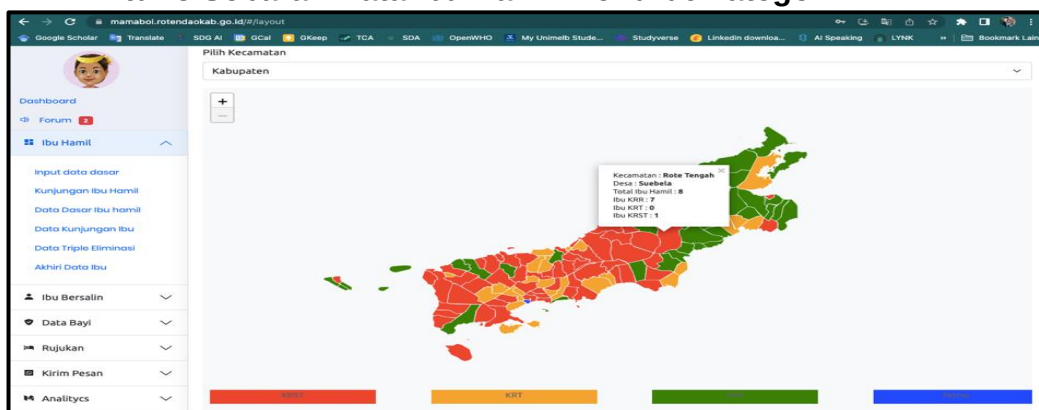
Puskesmas	KRR	KRT	KRST	Total Hamil	Status
Ba'a	243	315	112	980	siaga
Batutua	295	180	59	756	siaga
Busalangga	152	90	32	464	siaga
Delha	71	68	22	273	siaga
Eahun	151	51	18	359	siaga
Feapopi	47	48	20	191	siaga
Korbafo	79	36	9	182	siaga
Ndao	51	6	3	78	siaga
Oelaba	171	64	15	445	siaga
Oele	91	43	8	191	siaga
Snimani	74	15	5	134	siaga

2 Minggu Partus

- Ny. Abilena selan
Delha 41 minggu Oelot
085239432717
- Maria F. Nay
Eahun 43 minggu Batefalu
082144766478
- Cindy C Liu
Oele 41 minggu Daleholu
081217517940
- Berlin Bauana
Ba'a 41 minggu Lekunik
081236686696
- Ester sulla
Korbafo 41 minggu Tungganamo
081311060486

Sumber: <https://mamaboi.rotendaokab.go.id/>, Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, 2023

Gambar 2.6
Fitur 5 Sebaran Data Ibu Hamil Menurut Kategori



Sumber: <https://mamaboi.rotendaokab.go.id/> Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, 2023

Gambar 2.7
Fitur 6. Pesan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesehatan kepada Komunitas Sio Sodak

Pesan Edukasi

Sio Sodak

- ☒ Kepala Desa
- ☒ Camat
- ☒ Ibu Hamil
- ☒ Ibu Bersalin
- ☐ Pendoron Darah
- ☐ Tokoh Agama
- ☐ Tokoh Budaya / Maneleo
- ☐ Kader
- ☐ Bidan
- ☐ Suami

Isi pesan

Selamat pagi bapa/mama/basodara,
 Jangan lupa untuk memastikan ibu hamil agar memeriksakan kehamilannya secara rutin di fasilitas kesehatan terdekat. Apabila terdapat tanda-tanda bahaya kehamilan agar segera menghubungi bidan desa/kelurahan terdekat. Sodamolek.

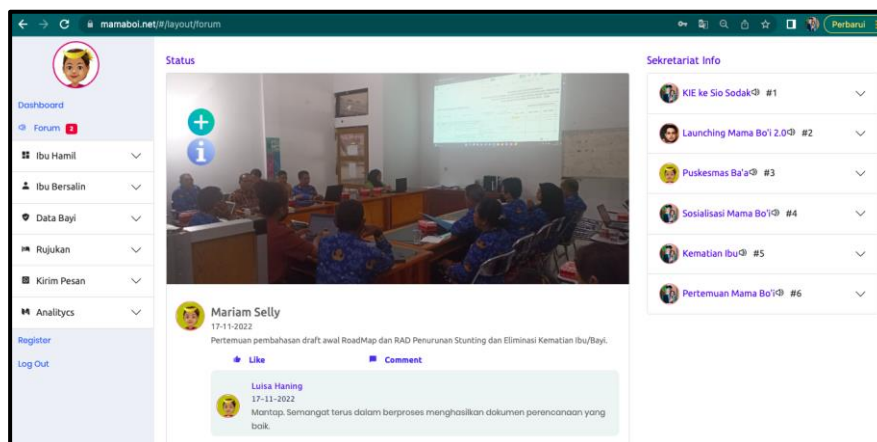
Kirim pesan 3

powered by Informatika - DKISIP Rote Ndao © copyright @ 2022

Sumber: <https://mamaboi.rotendaokab.go.id/> Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, 2023

Gambar 2.8

Fitur 7. Forum Mama *Bo'i* sebagai Wadah Pertukaran Informasi Antar User Mama *Bo'i*



Sumber: <https://mamaboi.rotendaokab.go.id/> Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, 2023

5. Transferabilitas

Berikut **3 pilar dalam sistem inovasi Mama *Bo'i*** yang dapat direplikasi, yakni:

- 1) **Komitmen** Kepala Daerah;
- 2) **Kolaborasi** terpadu lintas sektor; dan
- 3) **Penggunaan teknologi digital** yang terintegrasi dengan model *smart service*.

Berikut **3 langkah sederhana** yang dapat direplikasi antar daerah:

- 1) Pemetaan potensi jaring pengaman ibu hamil secara sosio-kultural dan demografis;
- 2) Koordinasi layanan data ibu dan anak secara lintas sektor dibawah Bapelitbang; dan
- 3) Pengambilan keputusan cepat serta evaluasi secara rutin berbasis aplikasi.

Inovasi **Mama *Bo'i*** di tingkat kabupaten ini pernah dipublikasi dalam pertemuan tingkat provinsi oleh Momentum USAID di Hotel Aston pada tanggal 22 April 2022.

6. Sumber Daya Keberlanjutan

Sumber daya baik keuangan, manusia maupun peralatan tersedia secara berkelanjutan melalui tahapan pemantuan rutin 2 (dua) mingguan oleh Sekretariat Bersama **Mama *Bo'i*** yang juga menjalankan layanan operasional di tingkat kabupaten. Selain itu, di lapangan terdapat 119 bidan desa dan 12 Bidan Puskesmas yang merupakan *user* tetap **Mama *Bo'i***. Biaya operasional (sewa server dan domain) sebesar Rp 750.000 per bulan dikeluarkan untuk menjalankan

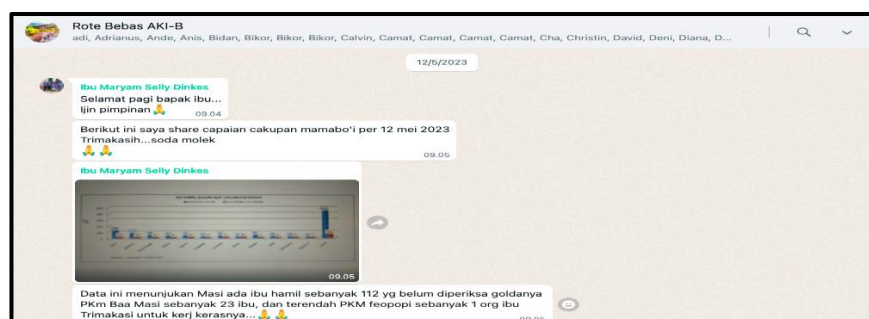
aplikasi **Mama Bo'i**. Penginputan pada web aplikasi **Mama Bo'i** menggunakan komputer di kabupaten dan user di lapangan menggunakan laptop dan HP untuk mendata, memantau, dan menginformasikan kejadian gawat darurat, rujukan dan pelayanan di desa dan Puskesmas.

Keberlanjutan inovasi dapat ditinjau dari beberapa aspek:

1) **Social engineering:**

- a) Data ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir diinput pada web aplikasi oleh user;
- b) User kabupaten menghimpun data dari web aplikasi dan menyampaikan pada pengambil kebijakan di grup *WhatsApp* “Rote Bebas AKI/B” yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Asisten Administrasi Umum, para kepala perangkat daerah terkait, fasilitator kabupaten Momentum USAID, para camat, Kepala Puskesmas dan seluruh bidan koordinator. Penyampaian data ini berlangsung secara rutin setiap 2 minggu sekali. Sedangkan data terkait kegawatdaruratan disampaikan secara kasuistik;

Gambar 2.9
Pengiriman Pesan Hasil Analisis Aplikasi Mama Bo'i
di Grup WhatsApp “Rote Bebas AKI/B”



Sumber: Sekretariat Bersama Mama Bo'i, Kabupaten Rote Ndao, 2023.

Gambar 2.10

Informasi Kegawatdaruratan dan Penanganan Persalinan di Fasilitas Kesehatan oleh Sio Sodak di grup WhatsApp pimpinan



Sumber: Sekretariat Bersama Mama Bo'i, Kabupaten Rote Ndao, 2023.

- c) Para pimpinan mengevaluasi dan memutuskan tindakan yang dibutuhkan untuk perbaikan kondisi layanan kesehatan ibu dan anak;
- d) *User Mama Bo'i* secara rutin mengirimkan pesan KIE kepada *Sio Sodak*.
- e) Dukungan tokoh agama dalam mendoakan ibu hamil risiko tinggi di tempat-tempat ibadah secara rutin; dan
- f) Rapat evaluasi bersama secara luring juga dilakukan setiap 2 minggu untuk memastikan layanan kesehatan ibu dan anak berjalan secara efektif.

2) Lingkungan kesehatan:

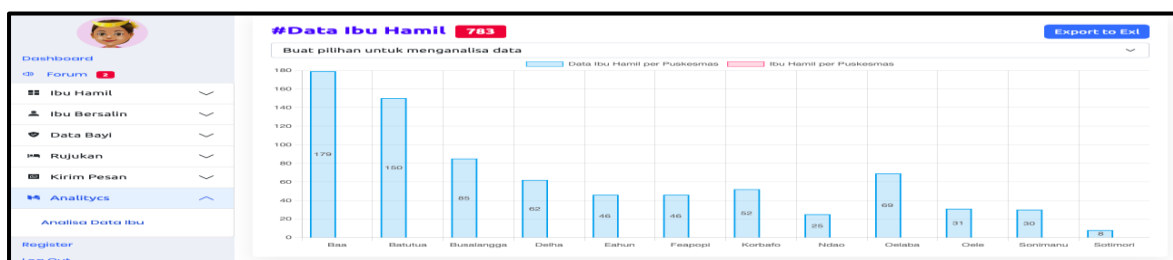
- a) Setiap kader diwajibkan mendampingi ibu hamil;
- b) Pelatihan tenaga kesehatan untuk Puskesmas Mampu PONED;
- c) Evaluasi terhadap kepatuhan pada Standar Oprasional Prosedur (SOP) layanan ibu dan bayi; dan
- d) Penguatan jaring pengaman sosial ibu guna mencegah keterlambatan pengambilan keputusan di lapangan.

7. Dampak

Inovasi Mama Bo'i selalu dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) minggu melalui rapat Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Penurunan Stunting, Eliminasi Kematian Ibu dan Bayi tingkat Kabupaten. Rapat ini dilakukan dengan melibatkan berbagai perangkat daerah terkait yang dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum. Rapat ini bertujuan untuk memantau dan menganalisis serta mengevaluasi berbagai perkembangan layanan ibu dan anak dengan menggunakan 2 (dua) instrumen, yaitu tabel data indikator komposit ibu dan bayi serta fitur analisis otomatis pada aplikasi Mama Bo'i. Evaluasi terhadap dampak pada kelompok masyarakat di luar sasaran utama (ibu dan bayi), yaitu kelompok *Sio Sodak*, juga dilakukan melalui pertemuan 2 (dua) mingguan agar lebih efisien dan efektif.

Gambar 2.11

Fitur *Analitics* Mama *Bo'i* yang Otomatis Menganalisis Data Hasil Entriian Ibu Hamil oleh *User Mama Bo'i* di Desa/Kelurahan



Sumber: <https://mamaboi.rotendaokab.go.id>, Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, 2023

Hasil pemantauan terhadap respon kelompok sasaran baik kelompok sasaran utama maupun kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran direkap secara berjenjang secara periodik melalui hasil intervensi pada inovasi Mama Bo'i. Indikator-indikator kinerja hasil yang dipakai untuk evaluasi diantaranya jumlah persalinan di fasilitas kesehatan dan di rumah, jumlah kasus pulang paksa yang berhasil diatasi oleh Sio Sodak, jumlah kematian ibu dan bayi. Selain itu juga terdapat berbagai indikator komposit pada kinerja proses yang dianalisis dan dievaluasi melalui tabel indikator komposit melalui pertemuan 2 (dua) mingguan.

Sejak Inovasi Mama Bo'i diterapkan, jumlah kematian ibu menurun dari 10 kasus pada tahun 2021 menjadi 6 kasus pada tahun 2022. Tahun 2023 3 kasus kematian ibu. Jumlah kematian bayi menurun dari 53 kasus pada tahun 2021 menjadi 38 kasus pada tahun 2023. Tahun 2021 banyak kasus pulang paksa yang tidak tertangani, sedangkan tahun 2022 seluruh kasus pulang paksa berhasil ditangani oleh Sio Sodak. Tahun 2021 hampir tidak terdapat kontribusi Sio Sodak, tetapi sejak tahun 2023 pengambilan keputusan pada tingkat rumah tangga dilakukan lebih cepat karena keterlibatan Sio Sodak. Perubahan dievaluasi dan dimonitor melalui aplikasi Mama Bo'i dengan biaya operasional yang sedikit, tetapi berdampak besar.

Gambar 2.12

Dampak Sebelum dan Sesudah Inovasi Mama Bo'i

Sebelum Inovasi Mama Bo'i	Setelah Inovasi Mama Bo'i
Tahun 2020: Kasus kematian ibu dan bayi masih tinggi. Penyebab: 1) Urusan kematian ibu dan bayi hanya oleh Dinas Kesehatan (<i>single sektor</i>). Belum terintegrasinya layanan lintas sektor. 2) Terbatasnya fitur aplikasi layanan. Tahun 2021: Kasus kematian ibu dan bayi masih tinggi. Penyebab antara: 1) Belum optimalnya peran lintas sektor 2) Fitur aplikasi yang terbatas. Akar penyebab 3 Terlambat.	Tahun 2022: Hasil antara: - Keterlambatan pengambilan keputusan dan kasus-kasus gawat darurat dapat terdeteksi oleh Lintas Sektor dan Sio Sodak termasuk oleh kader desa karena setiap ibu hamil memiliki kader binaan. - Sio Sodak ikut mengambil peran mencegah dalam kasus pulang paksa*). Kasus pulang paksa berhasil dicegah. Sejak Januari hingga Agustus tercatat 23 dari 22 kasus pulang paksa yang berhasil dicegah (96%). - Bidan tidak lagi mengolah data secara manual, tapi menghemat waktu dalam mengakses data yang telah terotomatisasi. - Camat dan kepala desa mengetahui berapa jumlah ibu hamil di wilayahnya Output: - Kasus kematian ibu menurun dari 10 kasus pada tahun 2021 menjadi 3 kasus pada tahun 2022 (November). - Kasus kematian ibu menurun dari 53 kasus pada tahun 2021 menjadi 17 kasus pada tahun 2022 (November).

*) Kasus pulang paksa adalah kasus dimana ibu hamil tidak ingin bersalin atau dirawat di fasilitas kesehatan dan mendesak tenaga kesehatan untuk pulang ke rumah dalam kondisi nyawa ibu ataupun anak yang terancam karena terputusnya layanan di fasilitas kesehatan.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao, 2023

8. Keterlibatan pemangku kepentingan

Awal pengembangan gagasan inovasi Mama Bo'i dilakukan secara kolaboratif oleh tiga instansi, yakni Dinas Kesehatan, Bapelitbang, Dinas KISP. Sedangkan dalam penerapan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, inovasi Mama Bo'i menciptakan konektivitas lintas perangkat daerah yang melibatkan Dinas

Kesehatan, DP3AP2KB, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu juga inovasi ini melibatkan interkoneksi dengan Sio Sodak (Tabel 2.5) yang berperan mencegah keterlambatan pengambilan keputusan dan mencegah kasus pulang paksa.

Tabel 2.5
Daftar Kolaborasi dan Keterlibatan Lintas Sektor
dan Jaring Pengaman (*Safety Net*) atau
Komunitas *Sio Sodak*

Lintas Sektor	<i>Sio Sodak</i>
Dinas Kesehatan (1)	Suami (2)
Dinas P3AP2KB (2)	Keluarga ibu hamil (termasuk ibu mertua) (2)
Dinas Sosial (2)	Kader desa (2)
Dinas Dukcapil (2)	Bidan (1)
Dinas PMD (1)	Tokoh adat (2)
Dinas KISP (1)	Tokoh masyarakat (2)
Bapelitbang (1)	Tokoh agama (2)
RSUD Ba'a (1)	Calon pendonor (2)
Kepala Puskesmas (1)	Kepala desa/lurah (1)
Camat (1)	Camat (1)
Momentum USAID (2)	
Organisasi profesi kesehatan (2)	

Keterangan:

- (1) Jumlah Lintas Sektor dan Sio Sodak yang terlibat pada tahap inisiasi/implementasi awal tahun 2021.
- (2) Jumlah Lintas Sektor dan Sio Sodak yang terlibat pada tahap implementasi tahun 2022.

Inovasi **Mama Bo'i** menggerakkan pihak-pihak terkait, diantaranya kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pelindung dan penanggung jawab, kepala Bapelitbang dan kepala dinas sebagai pengarah turut mengevaluasi kegiatan **Mama Bo'i**. Layanan KIA juga dievaluasi oleh lintas perangkat daerah, diantaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang turut menggerakkan masyarakat, Kepala Dinas DP3AP2KB, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pengelola Kesehatan Ibu dan Anak di Dinas Kesehatan, dokter SpOG, dokter spesialis anak, seluruh bidan di Puskesmas, di desa/kelurahan dan di rumah sakit, kepala Puskesmas, kepala desa/lurah, dan Momentum USAID sebagai lembaga pembangunan internasional yang berperan aktif dalam mendukung dan memfasilitasi pelayanan ibu dan bayi di Kabupaten Rote Ndao.

9. Keterlibatan pemangku kepentingan

Pengalaman tahun 2023 menunjukkan bahwa ada banyak pihak jaring pengaman sosial ibu hamil yang punya semangat untuk ikut berkontribusi dan berkolaborasi. Namun demikian belum semua data terupdate dengan baik untuk diimplementasi di lapangan. Selain itu optimalisasi peran media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) merupakan tantangan sekaligus peluang ke depan. Tahun ini upaya perbaikan inovasi diarahkan pada dua aspek yaitu pemutakhiran sistem verifikasi data untuk dapat dilanjutkan di lapangan oleh Sio Sodak sekaligus optimalisasi pesan kesehatan melalui media KIE kepada 9 (sembilan) jaring pengaman ibu hamil, “karena semua ibu melahirkan adalah mama kita dan semua bayi adalah adik kita”.

2.4 TUJUAN 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pendidikan Berkualitas Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2023:

Tabel 2.6 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua						

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK)	Dinas PKO Kab. Rote Ndao	104,01	61,58	90,15	91,67
4.1.1.(e)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas PKO Kab. Rote Ndao	7,59	7,71	7,76	7,82
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2)SMP/MTs/seder	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
	ajat.					
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas PKO Kab. Rote Ndao	N/A	84,57	96,94	96,94
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas PKO Kab. Rote Ndao	N/A	84,57	96,94	96,94
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

Bidang pendidikan sebagai urusan wajib pelayanan dasar dalam upaya penurunan kemiskinan memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan

sumber daya manusia yang berkualitas. Berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat memacu peningkatan pembangunan bidang pendidikan sebagai salah satu program prioritas di Kabupaten Rote Ndao. Kebijakan urusan pendidikan di Kabupaten Rote Ndao bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia potensial dan kompetitif, dimulai dari menyiapkan dan mengembangkan kualitas pendidikan anak usia dini, wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (SD/MI dan SMP/MTs), pendidikan non formal (Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA atau SMK/MAK), pendidikan luar biasa, pendidikan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan serta program manajemen pelayanan pendidikan. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rote Ndao telah menunjukkan kemajuan dan keberhasilan dari berbagai jenjang pendidikan, sampai dengan Tahun 2022 Kabupaten Rote Ndao telah memiliki 122 Sekolah Dasar Negeri dan 28 Sekolah Dasar Swasta sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama terdiri dari 40 Sekolah Negeri dan 5 Sekolah Menengah Pertama Swasta yang tersebar di 11 kecamatan, kenaikan angka rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah.

1) Angka Rata Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun dengan kata lain rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan, yaitu rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, yaitu tamat SD/ sederajat adalah 6 tahun, tamat SMP/ sederajat adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Dampak dari kenaikan Rata-Rata Lama Sekolah sebagai berikut:

- ❖ **Peningkatan Keterampilan dan Produktivitas:** Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin besar pula kesempatan individu untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang lebih tinggi, yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja.
- ❖ **Penurunan Kemiskinan:** Pendidikan yang lebih baik memberikan lebih banyak kesempatan bagi seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga berpotensi menurunkan angka kemiskinan.
- ❖ **Pertumbuhan Ekonomi:** Dengan tenaga kerja yang lebih terdidik, produktivitas dan inovasi dalam berbagai sektor ekonomi meningkat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.7
Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao,
Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2023

	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)			
	2020	2021	2022	2023
Kab. Rote Ndao	7,59	7,71	7,76	7,82
Prov. Nusa Tenggara Timur	7,63	7,69	7,70	7,82
Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao 2023; BPS Prov. NTT 2023; Statistik Indonesia 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rote Ndao Pada tahun 2020 adalah 7,59 tahun, dan terjadi peningkatan bertahap hingga mencapai 7,82 tahun pada 2023, Ini menunjukkan peningkatan konsisten setiap tahun, dengan kenaikan sekitar 0,23 tahun dari 2020 hingga 2023. Data ini menunjukkan rata-rata penduduk Rote Ndao hanya mencapai pendidikan pada kelas 7 atau tahun pertama di SMP/ sederajat. Pada tahun 2022, angka rata-rata lama sekolah untuk kabupaten Rote Ndao menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada di provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rata-rata lama sekolah sebesar 7,70. Rata-rata lama sekolah di tingkat nasional menunjukkan tren yang lebih tinggi dibandingkan daerah, dimulai dari 8,48 tahun pada 2020 dan naik hingga

8,77 tahun pada 2023. Kenaikan sebesar 0,29 tahun ini menandakan bahwa secara nasional, akses pendidikan juga meningkat, meskipun angkanya lebih tinggi dibandingkan NTT dan Rote Ndao.

2) Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS menggantikan komponen angka melek huruf pada metode lama. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Standar HLS adalah minimal 0 tahun dan maksimal 18 tahun. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 adalah sebesar 13,18 tahun menjadi 13,21 tahun pada tahun 2022 dan Provinsi NTT pada tahun 2022 angka Harapan Lama sekolah sebesar 13,20 tahun. Perkembangan HLS dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.8
Perkembangan Harapan Lama Sekolah
di Kabupaten Rote Ndao, NTT dan Nasional Tahun 2020-2023

	Harapan Lama Sekolah (Tahun)			
	2020	2021	2022	2023
Kab. Rote Ndao	13,18	13,19	13,21	13,22
Provinsi Nusa Tenggara Timur	13,18	13,20	13,21	13,22
Nasional	12,98	13,08	13,10	13,15

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao 2023, BPS Prov. NTT 2023, Statistik Indonesia 2023

Angka harapan lama sekolah di Rote Ndao mengalami sedikit peningkatan dari 13,19 tahun pada tahun 2021 menjadi sebesar 13,22 tahun pada tahun 2023. Ini berarti, anak-anak yang berusia tujuh tahun pada tahun 2020, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,19 tahun atau

minimal jenjang Diploma I. Angka harapan lama sekolah mengalami Kenaikan relatif kecil, hanya 0,04 tahun dalam periode empat tahun, tetapi menunjukkan peningkatan yang konsisten. Secara umum, ada peningkatan dalam harapan lama sekolah di ketiga wilayah tersebut, yang mencerminkan upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan di seluruh tingkatan

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Rata-Rata Lama Sekolah

a) Pendidikan Wajib dan Akses Pendidikan yang Lebih Luas:

- ❖ Perpanjangan Wajib Belajar: Kebijakan wajib belajar 12 tahun perlu ditegakkan secara konsisten, dan pemerintah bisa mempertimbangkan perpanjangan lebih lanjut untuk mendorong siswa menyelesaikan pendidikan hingga SMA/SMK atau sederajat.
- ❖ Pembangunan Infrastruktur Pendidikan: Membangun sekolah-sekolah di daerah terpencil atau sulit dijangkau, serta menyediakan transportasi atau akomodasi untuk siswa yang tinggal jauh dari sekolah, dapat meningkatkan akses ke pendidikan.

Program Pendidikan Gratis:

b) Penyediaan Fasilitas dan Sarana Pendidikan:

- ❖ Beasiswa dan Bantuan Pendidikan: Meningkatkan alokasi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi tanpa terganggu masalah finansial.
- ❖ Program Kartu Indonesia Pintar (KIP): Memperluas cakupan KIP hingga ke pendidikan menengah atas dan vokasi, serta mempermudah proses akses bantuan ini. Subsidi dan Bantuan Keuangan:

c) Pendidikan Berkualitas:

- ❖ Peningkatan Kualitas Guru: Melakukan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru, termasuk kemampuan pedagogi, teknologi, dan manajemen kelas, agar siswa dapat belajar dengan lebih efektif.

- ❖ Kurikulum yang Relevan dan Menarik: Meningkatkan kualitas kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan dunia kerja. Kurikulum harus menarik, relevan dengan dunia nyata, dan memberikan keterampilan yang berguna bagi masa depan siswa.
 - ❖ Pengajaran Berbasis Teknologi: Memanfaatkan teknologi digital dalam pengajaran untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam proses belajar, terutama di daerah terpencil
- Penguatan Program Bimbingan dan Konseling:

d) Program Khusus untuk Mencegah Putus Sekolah:

- ❖ Bimbingan dan Konseling: Menyediakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk membantu siswa mengatasi masalah sosial dan emosional yang bisa menyebabkan mereka putus sekolah.
- ❖ Program Sekolah Inklusif: Menyediakan fasilitas dan program bagi siswa dengan kebutuhan khusus agar mereka tidak tertinggal dan memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan.
- ❖ Program Paket A, B, dan C: Mendorong siswa yang sudah putus sekolah untuk melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan seperti Paket A, B, dan C, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan formal atau non-formal.

e) Membangun Kesadaran Pentingnya Pendidikan:

- ❖ Kampanye Publik tentang Pentingnya Pendidikan: Melakukan kampanye kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk masa depan ekonomi dan sosial, serta memberikan contoh keberhasilan individu yang menyelesaikan pendidikan tinggi.
- ❖ Pemberdayaan Masyarakat: Melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan organisasi sosial untuk mendorong anak-anak menyelesaikan pendidikan, terutama di daerah dengan budaya atau kondisi ekonomi yang menantang.

f) Kolaborasi dengan dunia kerja

- ❖ Program Pendidikan Vokasi dan Magang: Meningkatkan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang terkait

langsung dengan dunia kerja untuk memotivasi siswa agar tetap bersekolah. Kerjasama dengan perusahaan untuk program magang bisa memberikan keterampilan kerja sekaligus pengalaman dunia nyata.

- ❖ Dukungan Bagi Siswa yang Bekerja: Mengembangkan program sekolah malam atau pendidikan jarak jauh (online) bagi siswa yang sudah bekerja atau memiliki tanggung jawab keluarga, sehingga mereka bisa melanjutkan sekolah tanpa harus meninggalkan pekerjaan.

g) Peningkatan Peran Orang Tua:

- ❖ Program Pendidikan Orang Tua: Meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan anak dengan memberikan pelatihan atau program yang fokus pada cara mendukung pendidikan anak di rumah.
- ❖ Dukungan Finansial bagi Keluarga: Memberikan bantuan kepada keluarga yang kurang mampu agar mereka tidak mengeluarkan anak-anak dari sekolah untuk bekerja.

h) Perbaikan Lingkungan Sekolah

- ❖ Peningkatan Fasilitas Sekolah: Meningkatkan fasilitas fisik seperti ruang kelas yang memadai, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan nyaman.
- ❖ Kesejahteraan Siswa: Menyediakan makanan bergizi dan program kesehatan bagi siswa di sekolah agar mereka dapat fokus belajar tanpa terkendala masalah kesehatan.

i) Penggunaan Teknologi untuk Pendidikan Terbuka:

- ❖ Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ): Meningkatkan akses ke teknologi pendidikan untuk wilayah-wilayah terpencil melalui pembelajaran jarak jauh atau pendidikan berbasis internet, sehingga siswa dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus hadir secara fisik di sekolah.
- ❖ E-Learning dan Platform Digital: Mendorong penggunaan platform e-learning untuk mengakomodasi siswa yang tidak dapat mengikuti

sekolah konvensional atau yang memiliki keterbatasan fisik/geografis.

j) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan:

- ❖ Evaluasi Kebijakan Pendidikan: Melakukan evaluasi kebijakan pendidikan secara berkala untuk menilai efektivitas program yang dijalankan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
- ❖ Pemantauan Putus Sekolah: Memantau angka putus sekolah di berbagai daerah dan mengidentifikasi penyebab utamanya untuk menangani masalah tersebut dengan pendekatan yang sesuai.

Kebijakan dan strategi di atas harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat Rote Ndao. Dalam implementasinya, keterlibatan dan dukungan dari berbagai pihak akan menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rote Ndao.

2. Harapan Lama Sekolah

a) Aksesibilitas Pendidikan:

- ❖ Memastikan akses pendidikan yang lebih mudah bagi seluruh anak, termasuk yang tinggal di daerah terpencil atau terpinggirkan. Hal ini bisa dilakukan dengan membangun sekolah di lokasi yang strategis atau memberikan transportasi gratis bagi siswa yang jarak rumahnya jauh dari sekolah.
- ❖ Menyediakan beasiswa atau bantuan finansial bagi siswa yang kurang mampu agar biaya pendidikan tidak menjadi hambatan.

b) Peningkatan Kualitas Pendidikan:

- ❖ Memperkuat pelatihan dan pengembangan guru agar mereka menjadi lebih berkualitas dalam menyampaikan materi, menggunakan metode pembelajaran yang efektif, dan memberikan motivasi bagi siswa.
- ❖ Menyediakan sumber daya dan fasilitas yang memadai di sekolah, seperti perpustakaan, laboratorium, dan teknologi pembelajaran.

c) Kurikulum yang Relevan:

Mengupayakan agar kurikulum yang diterapkan di sekolah mengikuti perkembangan zaman dan relevan dengan kebutuhan dan kepentingan siswa. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan para ahli, praktisi industri, dan masyarakat dalam merancang kurikulum.

d) Pencegahan Putus Sekolah:

- ❖ Melakukan identifikasi dini terhadap siswa yang berpotensi putus sekolah dan memberikan bimbingan serta dukungan yang tepat untuk mencegahnya.
- ❖ Mengadopsi program mentoring atau bimbingan bagi siswa agar mereka merasa lebih termotivasi dan memiliki peran model yang menginspirasi.
- ❖ Kebijakan yang holistik diperlukan, mencakup aspek ekonomi, sosial, kualitas pendidikan, dan aksesibilitas. Pelibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting. Melalui pendekatan kolaboratif dan strategi yang berkelanjutan, angka putus sekolah dapat ditekan dan kesempatan pendidikan yang berkualitas dapat diberikan kepada semua anak.

e) Melibatkan masyarakat dalam mendukung dan mengawasi proses pendidikan, misalnya melalui komite sekolah atau program bantuan sukarela.

f) Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan:

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran, misalnya dengan penggunaan platform e-learning, yang dapat memfasilitasi belajar di luar kelas dan meningkatkan akses pendidikan.

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi oleh inovasi dan praktik baik sebagai berikut:

1. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang kuat dalam mengemban Misi ke-1 RPJPD 2025-2045 yaitu Mewujudkan sumber-daya manusia Rote Ndao yang bermutu, berdaya saing dan bermartabat dengan asas keadilan dan pemerataan;
2. Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Rote Ndao; dan
3. Adanya dukungan dana dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Rote Ndao.

2.5 TUJUAN 5: KESETARAAN GENDER

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kesetaraan Gender Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2022:

Tabel 2.9 Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan						
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DP3AP2KB	2	18	19	19
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Data Simponi PPA dan Statistik	0,06	0,06	0,09	0,09
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DP3AP2KB	0,05	0,11	0,14	0,27
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Data Simponi PPA dan Statistik	0,03	0,05	0,04	0,02

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Data Simponi PPA	91	90,7	91,3	95
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Bidang KB	17	0,87	0,18	23,88
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Bidang KB	19.308	14.506	14.506	14.506
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	BPS	DPR Pusat 20,8 DPRD Prov NTT:20 DPRD Rote Ndao : 0	DPR Pusat 20,8 DPRD Prov NTT: 20 DPRD Rote Ndao : 0	DPR Pusat 20,8 DPRD Prov NTT : 20 DPRD Rote Ndao: 0	DPR Pusat 20,8 DPRD Prov NTT : 20 DPRD Rote Ndao: 0
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BPS	11,43	11,43	14,28	9,67
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan	Bidang KB dan BPS	69,40	39,18	24,85	25,97

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
	layanan kesehatan reproduksi.					
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Bidang KB dan BPS	7,15	14,41	39,53	25,70
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	DP3AP2KB dan BPS	86,41	76,37	50,04	52,94

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

Meningkatkan ketahanan dan peran keluarga, serta perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu arah kebijakan Misi ke-1 RPJPD 2025-2045 yaitu Mewujudkan sumber-daya manusia Rote Ndao yang bermutu, berdaya saing dan bermartabat dengan asas keadilan dan pemerataan. Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memegang peran dan posisi yang strategis diantaranya terhadap keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan dan keluarga berencana dengan mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik yang dimiliki.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menurun dari 4,69% pada 2020 menjadi 3,90% pada 2022, tetapi mengalami sedikit kenaikan menjadi 4,2% pada 2023. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) mengalami penurunan bertahap dari 0,10% pada 2020 menjadi 0,07% pada tahun 2023. Partisipasi angkatan kerja perempuan di angkatan kerja berfluktuasi. Pada tahun 2020, angkanya adalah 65,77%, menurun hingga 61,99% pada tahun 2021, dan kemudian sedikit naik menjadi 64,18% di tahun 2023. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan

penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Pada tahun 2020, cakupannya sebesar 91,20%, kemudian meningkat menjadi 100% untuk tiga tahun berikutnya yaitu tahun 2021-2023.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%): Cakupan layanan ini selalu berada pada tingkat 100% dari 2020 hingga 2023. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum Pada tahun 2020 cakupannya adalah 85,50%, kemudian sedikit menurun menjadi 84,09% pada tahun 2021, meningkat menjadi 100% pada tahun 2022, tetapi turun lagi menjadi 88% pada tahun 2023. Dan yang terakhir adalah Cakupan layanan pemulangan bagi anak perempuan dan anak korban kekerasan (%): Cakupan ini tetap stabil di 100% dari 2020 hingga 2023. Capaian kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.10
Kualitas Layanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	4,69	4,11	3,90	4,2
2	Rasio KDRT (%)	0,10	0,08	0,09	0,07
3	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	65,77	61,99	62,16	64,18
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	91,20	100	100	100
5	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)	100	100	100	100
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	85,50	84,09	100	88

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
7	Cakupan layanan pemulangan bagi anak perempuan dan anak korban kekerasan (%)	100	100	100	100

Sumber: Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao Tahun 2023

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan dan strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Rote Ndao yaitu:

1. Pendidikan dan Pelatihan: Memastikan akses pendidikan yang setara bagi perempuan dan anak-anak, serta menyediakan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka.
2. Kesehatan dan Gizi: Menjamin akses yang setara terhadap layanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi, imunisasi, dan layanan kesehatan anak-anak.
3. Pencegahan Kekerasan: Mengembangkan strategi untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta memberikan dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan.
4. Partisipasi Aktif: Mendorong partisipasi aktif perempuan dan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan yang berpengaruh pada kebijakan dan program yang mengenai mereka.
5. Pemberdayaan Ekonomi: Memberikan peluang ekonomi bagi perempuan melalui pelatihan keterampilan, akses ke pekerjaan yang layak, dan dukungan untuk usaha kecil dan menengah.
6. Hukum dan Kebijakan: Memastikan adopsi dan implementasi hukum serta kebijakan yang melindungi hak perempuan dan anak-anak, termasuk hukum yang mengkriminalisasi kekerasan dan eksploitasi terhadap mereka.
7. Advokasi dan Kesadaran: Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak perempuan dan anak-anak, serta memobilisasi dukungan publik untuk mengatasi diskriminasi dan kekerasan.
8. Pantauan dan Evaluasi: Membangun sistem pemantauan dan evaluasi untuk mengukur efektivitas kebijakan dan strategi yang diimplementasikan serta menemukan area yang perlu perbaikan.

9. Kemitraan: Bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, untuk mencapai tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10. Dana dan Sumber Daya: Memastikan alokasi dana dan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan dan strategi ini.
11. Pendidikan Seksual: Menyediakan pendidikan seksual yang holistik dan berbasis fakta kepada anak-anak dan remaja untuk membantu mereka mengembangkan pemahaman yang sehat tentang tubuh, hubungan, dan seksualitas.
12. Perlindungan Anak Online: Mengatasi risiko yang terkait dengan teknologi dan internet, termasuk perlindungan terhadap eksploitasi seksual *online* dan *cyberbullying*.
13. Pemberdayaan Perempuan di Komunitas Marginal: Memperhatikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak-anak di komunitas yang lebih rentan, seperti suku-suku terasing atau komunitas miskin.
14. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA): Inisiatif ini bertujuan menciptakan desa yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Desa-desa ini didorong untuk mengutamakan pendidikan, kesehatan, dan hak-hak perempuan dan anak, serta mencegah kekerasan dalam bentuk apapun

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Inovasi dan praktik baik pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Rote Ndao yaitu:

1. Teknologi untuk Kesadaran dan Pelaporan: Penggunaan aplikasi seluler atau *platform online* untuk memberikan informasi tentang hak-hak perempuan dan anak-anak, serta menyediakan saluran pelaporan untuk kasus-kasus kekerasan atau pelanggaran lainnya. Contohnya, platform pelaporan daring dapat memungkinkan korban atau saksi untuk secara anonim melaporkan kekerasan atau kasus perlindungan anak.
2. Pusat Krisis 24/7: Membangun pusat krisis yang tersedia 24/7 untuk memberikan dukungan, konseling, dan perlindungan bagi korban kekerasan

atau pelecehan. Ini dapat melibatkan psikolog, konselor, dan pekerja sosial yang terlatih.

3. Pendidikan Inklusif: Menerapkan pendidikan inklusif yang memastikan bahwa anak-anak dengan berbagai kebutuhan khusus, baik fisik maupun intelektual, mendapatkan akses penuh terhadap pendidikan yang berkualitas.
4. Model Peran Positif: Menggunakan model peran positif, seperti kampanye dengan tokoh-tokoh terkenal atau mentor lokal yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5. Kemitraan Sektor Swasta: Mengajak sektor swasta untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik dalam bentuk pelatihan keterampilan atau menyediakan peluang pekerjaan yang aman.
6. Kelas Keterampilan dan Kewirausahaan: Menyelenggarakan kelas keterampilan dan kewirausahaan khusus bagi perempuan untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan yang berguna dalam dunia kerja atau untuk memulai usaha kecil.
7. Program Pengembangan Diri: Menyelenggarakan program pengembangan diri yang fokus pada peningkatan kepercayaan diri, keterampilan komunikasi, dan kepemimpinan bagi perempuan dan anak-anak.
8. Pendidikan Seksual Komprehensif: Menyediakan pendidikan seksual yang komprehensif dan berbasis fakta bagi remaja, dengan tujuan membantu mereka membuat keputusan yang sehat terkait kesehatan seksual dan hubungan.
9. Pemberdayaan Digital: Memberikan pelatihan tentang literasi digital kepada perempuan dan anak-anak, termasuk tentang penggunaan internet secara aman dan bijaksana.
10. Kampanye Anti-Bullying: Meluncurkan kampanye untuk melawan pelecehan dan *bullying* di sekolah-sekolah dan masyarakat, dengan fokus pada menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif.
11. Ruang Aman bagi Anak: Mendirikan ruang aman atau pusat perlindungan bagi anak-anak yang terlantar atau mengalami risiko tinggi, dengan

menyediakan tempat bermain, pendidikan informal, dan dukungan psikososial.

12. Penggunaan Seni dan Budaya: Menggunakan seni dan budaya sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
13. Pendekatan Berbasis Masyarakat: Menerapkan pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal.
14. Pendekatan Holistik: Mengadopsi pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek fisik, emosional, sosial, dan ekonomi dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
15. Program Pelatihan Keterampilan Berbasis Kearifan Lokal
 - ❖ Inovasi: Mengadakan pelatihan keterampilan bagi perempuan berbasis kearifan lokal, seperti tenun ikat, kerajinan tangan, serta pertanian lokal yang berkelanjutan.
 - ❖ Praktik Baik: Program ini memberikan perempuan kesempatan untuk memanfaatkan keterampilan tradisional dan mengembangkannya menjadi usaha kecil yang berdaya saing. Misalnya, membuat produk tenun ikat untuk pasar lokal maupun internasional, yang pada akhirnya meningkatkan ekonomi keluarga.
16. Pusat Pelayanan Terpadu untuk Korban Kekerasan (P2TP2A)
 - ❖ Inovasi: Mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan dukungan hukum, psikologis, dan rehabilitasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan berbasis gender.
 - ❖ Praktik Baik: Pusat ini memungkinkan perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan terintegrasi di satu tempat, sehingga proses pendampingan menjadi lebih efektif dan efisien.
17. Desa Ramah Perempuan dan Anak
 - ❖ Inovasi: Mengembangkan Desa Ramah Perempuan dan Anak di setiap kecamatan di Rote Ndao dengan kebijakan yang memprioritaskan hak-hak perempuan dan anak.

- ❖ Praktik Baik: Pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat untuk memastikan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak, termasuk dalam hal akses pendidikan, perlindungan hukum, serta pemberdayaan ekonomi. Desa ini juga dapat memberikan pelatihan kepada perangkat desa tentang cara menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara cepat dan tepat.

18. Kelompok Usaha Perempuan

- ❖ Inovasi: Membentuk kelompok usaha perempuan dengan fokus pada usaha mikro berbasis komunitas.
- ❖ Praktik Baik: Dengan adanya kelompok usaha ini, perempuan dapat saling mendukung, berbagi pengalaman, dan meningkatkan keterampilan kewirausahaan. Kelompok ini juga dapat memberikan akses ke modal mikro serta bantuan dalam pemasaran produk, terutama dalam industri kerajinan tangan dan makanan lokal.

19. Program Pengasuhan Anak Berbasis Komunitas

- ❖ Inovasi: Mengembangkan program Pengasuhan Anak Berbasis Komunitas yang melibatkan ibu-ibu di lingkungan setempat untuk saling membantu dalam mengasuh anak-anak mereka.
- ❖ Praktik Baik: Ini dapat membantu ibu-ibu yang harus bekerja namun tetap ingin memastikan anak-anak mereka mendapatkan pengasuhan yang baik dan lingkungan yang aman. Komunitas ini juga dapat memberikan pelatihan dasar kepada ibu-ibu tentang parenting yang efektif dan perlindungan anak.

20. Pendekatan Sosial Budaya dalam Kesetaraan Gender

- ❖ Inovasi: Menerapkan pendekatan sosial budaya dalam memperkuat kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender dengan melibatkan tokoh adat dan agama.
- ❖ Praktik Baik: Mengadakan dialog dengan pemuka masyarakat dan tokoh adat untuk membangun dukungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, yang diselaraskan dengan nilai-nilai lokal. Keterlibatan para pemimpin komunitas dalam kampanye ini dapat memberikan legitimasi dan dukungan lebih kuat untuk perubahan sosial.

21. Edukasi dan Pendampingan Kesehatan Reproduksi Remaja

- ❖ Inovasi: Program edukasi kesehatan reproduksi dan seksual kepada remaja, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan reproduksi.
- ❖ Praktik Baik: Program ini mencakup pelatihan dan pendampingan untuk remaja perempuan dan laki-laki, serta memberikan layanan konseling yang ramah anak untuk mencegah pernikahan dini, kehamilan remaja, dan masalah kesehatan reproduksi lainnya.

22. Platform Digital untuk Laporan Kekerasan

- ❖ Inovasi: Mengembangkan platform digital atau aplikasi untuk memfasilitasi pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak secara cepat dan rahasia.
- ❖ Praktik Baik: Masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dapat melaporkan kasus kekerasan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Aplikasi ini akan terhubung dengan layanan bantuan yang bisa segera merespons laporan dan memberikan bantuan hukum dan psikologis.

23. Program Beasiswa untuk Anak-Anak Perempuan

- ❖ Inovasi: Memberikan beasiswa khusus bagi anak-anak perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- ❖ Praktik Baik: Program beasiswa ini akan membantu mengurangi angka putus sekolah di kalangan anak perempuan dan mendorong mereka untuk mengembangkan potensi akademis dan keterampilan hidup mereka.

2.6 TUJUAN 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Air Bersih dan Sanitasi Layak Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2023:

Tabel 2.11
Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2021	Realisasi	
				2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 6 : Mencapai Air Bersih dan Sanitasi Layak					

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2021	Realisasi	
				2022	2023
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas PUPR	79,47	79,47	72,84
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	N/A	N/A	N/A	N/A
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas PUPR	79,47	79,47	72,84
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	N/A	N/A	N/A	N/A
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas PUPR	79,92	80,09	79,54
6.2.1.(c)	Jumlah desa / kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	119	119	119
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free</i> (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	30	33	33

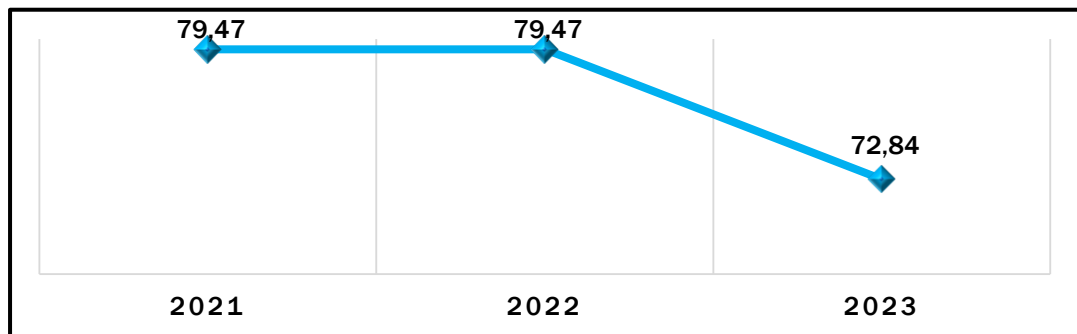
Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2021	Realisasi	
				2022	2023
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	N/A	N/A	N/A	N/A
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	N/A	N/A	N/A	N/A
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	N/A	N/A	N/A	N/A
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	N/A	N/A	N/A	N/A
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	N/A	N/A	N/A	N/A

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

1. Air Bersih/Minum Layak

Akses terhadap air minum dan sanitasi dasar merupakan hak asasi manusia yang mendasar yang sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan lain seperti kesehatan, kemiskinan, dan pembangunan manusia, sehingga merupakan salah satu prioritas pembangunan kabupaten. Persentase rumah tangga berakses air minum layak sesuai dengan target RPJMD dan SPM yaitu 100%. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung, meliputi air ledeng (keran), keran umum, hidran umum, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Gambaran tren capaian air minum layak di Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Grafik 2.4
Persentase Penduduk Berakses Air Minum Layak Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao Tahun 2024

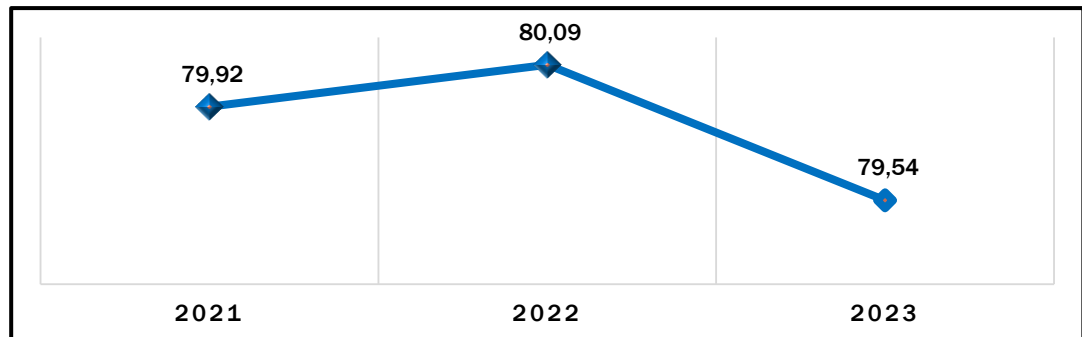
Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa upaya penyediaan layanan air minum layak bagi masyarakat dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah tetap dan menurun pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh perubahan formula pengukuran yang memperhitungkan penambahan jumlah RT pada tahun berkenaan sehingga hasil perhitungan cenderung tetap dan menurun. Namun data di lapangan menunjukkan adanya rumah tangga baru yang terlayani air minum layak setiap tahunnya. Kemajuan tersebut tidak lepas dari kerja bersama pelaku pembangunan di tingkat pusat, daerah, masyarakat maupun swasta. Meskipun terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian ini menunjukkan perlunya upaya keras untuk mencapai akses air minum layak 100% di tahun 2024 sesuai target RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024. Untuk itu, diperlukan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, badan usaha, lembaga donor, LSM, pihak swasta, lembaga pendidikan, komunitas dan media.

2. Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. Pemerintah terus meningkatkan akses terhadap sanitasi layak bagi seluruh masyarakat melalui berbagai upaya antara lain membangun sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat serta meningkatkan keterlibatan dan pemahaman masyarakat

tentang sanitasi. Capaian rumah tangga berakses sanitasi layak dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.5
Persentase RT Berakses Sanitasi Layak Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa upaya penyediaan akses sanitasi layak bagi masyarakat menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Penurunan angka capaian pada tahun 2023 disebabkan oleh perubahan dalam formulasi perhitungan yang menggunakan data jumlah RT yang meningkat dari perhitungan tahun sebelumnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa capaian sanitasi layak terus meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir. Meskipun demikian, capaian tersebut masih jauh dari target RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 – 2024 untuk akses sanitasi layak 100% di tahun 2024. Oleh karena itu, dukungan, komitmen, kolaborasi dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing diperlukan untuk mewujudkan target tersebut

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum dan sanitasi yang layak, pemerintah Kabupaten Rote Ndao telah menetapkan kebijakan, strategi, sasaran dan program dalam RPJMD yang kemudian secara operasional dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan target yang terukur.

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Air minum dan sanitasi layak merupakan salah satu kebutuhan dasar dan hak sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Untuk mencapai hal tersebut, maka pemerintah daerah terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai *stakeholder* dalam penyediaan air bersih/minum, antara lain: pengembangan SPAM dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, program PAMSIMAS, DAK Air Minum, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBD Desa, penguatan terhadap struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), penyediaan instalasi air bersih dan penanaman pohon di sumber-sumber air yang dibangun oleh Astra. Selain dari pada itu, PDAM Kabupaten Rote Ndao terus meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari 8 (delapan) sumber yakni mata air Siokoen dengan kapasitas 17,5 liter/detik, Oemau 10 liter/detik, Lualemba 15 liter/detik, Lidabesi 10 liter/detik, Nioen 15 liter/detik, Lelebe 10 liter/detik, Sumur Bor Kantor Camat Pantai Baru 5 liter/detik. Dari total kapasitas terpasang sebesar 87,5 liter/detik dan kapasitas produksi sebesar 34,5 liter/detik terdapat *idle capacity* sebesar 53 liter/detik yang masih dapat dimaksimalkan untuk perluasan jaringan pelayanan air bersih. Selain air permukaan, sumber air baku dari air bawah tanah memiliki potensi yang besar yakni dari Cekungan air Tanah (CAT). Kabupaten Rote Ndao memiliki 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) yakni CAT Nemberala dengan luas 236 km², CAT Batutua luas 229 km² dan CAT Rote luas 250 km². Potensi CAT ini bila dieksplorasi secara maksimal dengan sumur bor, sumur gali ataupun dengan teknologi lainnya, dapat menopang kebutuhan air utama di Kabupaten Rote Ndao.

Upaya pemerintah untuk mencapai target penduduk berakses sanitasi layak juga terus ditingkatkan melalui pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat yang berasal dari berbagai sumber dana, baik APBD, DAK sanitasi dan Program SANIMAS SPALD-S, serta yang tidak kalah pentingnya yakni meningkatkan keterlibatan dan pemahaman masyarakat tentang sanitasi melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi dan edukasi. Selain itu, untuk percepatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi layak sesuai dengan

target RPJMD dan SPM yaitu 100%, kegiatan pembangunan rumah layak huni (ALADIN: atap, lantai dan dinding) di Kabupaten Rote Ndao dilakukan secara terpadu dengan pembangunan sanitasi, air bersih dan listrik atau disingkat ALADIN plus SARLIN.

2.7 TUJUAN 7: ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Energi Bersih dan Terjangkau Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2023:

Tabel 2.12
Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2021	Realisasi	
				2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua					
7.2.1*	Bauran energi terbarukan	N/A	N/A	N/A	N/A

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

Pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di kabupaten Rote Ndao untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan listrik/penerangan di daerah-daerah yang belum dijangkau oleh PLN juga diupayakan oleh pemerintah kabupaten Rote Ndao melalui berbagai sumber dana sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Pembangunan PLTS Terpusat

Tahun	Lokasi	Kapasitas (KW)	Sumber Dana
2011	Maeoe	5	DAK
2012	1. Desa Suebela	15	APBN
	2. Desa Lidor	15	
	3. Desa Bo'a	15	
2013	1. Desa Oelasin (Fuafuni)	10	APBN

Tahun	Lokasi	Kapasitas (KW)	Sumber Dana
	2. Desa Landu	10	
	3. Desa Limakoli	4	
2014	Desa Dodaek	15	DAU
2015	1. Desa Nuse	25	DAU
	2. Desa Daiama	75	APBN
	3. Desa Landu	5	APBN
	4. Desa Kuli	5	APBN
	5. Desa Batefalu	10	APBN
2016	Desa Mbokak	50	APBN
2019	Desa Tenalai	70	PLN (APBN)
2021	Desa Fuafuni	19	Kerja sama NGO dan BAPENAS

Sumber: Dinas PKPLH Tahun 2024

Namun, sebagian besar dari PLTS tersebut di atas dalam kondisi rusak sehingga tidak berfungsi lagi karena biaya operasional dan pemeliharaan yang mahal dan tidak berfungsinya Lembaga di desa/Bumdes dalam pengelolaan PLTS menjadi kendala yang belum teratasi sampai dengan saat ini.

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pencapaian rasio elektrifikasi di Kabupaten Rote Ndao dipengaruhi oleh kinerja PLN (Kementerian ESDM) karena pengadaan sarana prasarana untuk pemenuhan kebutuhan listrik/ penerangan bukan lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Namun pemerintah Kabupaten Rote Ndao tetap berkomitmen untuk melakukan percepatan cakupan pelayanan listrik dengan melakukan identifikasi dan pendataan bagi masyarakat belum berlistrik terutama masyarakat miskin yang masuk dalam DTKS, sehingga bisa diusulkan untuk mendapat pembiayaan pembangunan sarana prasarana kelistrikan melalui APBD Provinsi, APBN (Kementerian ESDM) dan lembaga lainnya.

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

1. Objek wisata Telaga Nirwana, di Desa Oeseli, Kecamatan Rote Barat Daya, menjadi *pilot project* perahu yang digerakkan oleh mesin bertenaga surya

atau *Photovoltaics Boat* (PV Boat) pertama Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama mitra strategisnya dalam rangka mendorong Pariwisata Berkelanjutan dengan memanfaatkan Teknologi Tenaga Surya. Implementasi perahu listrik tersebut dilaksanakan melalui *project Renewable Energy for Electrification Programme Phase II* (REEP2), *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH* (GIZ), perusahaan internasional milik Pemerintah Federal Jerman, yang mendampingi tiga kelompok komunitas lokal yang bernaung di bawah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Oeseli yang mengembangkan bisnis pariwisata bahari Telaga Nirwana. Project PV Boat yang dilaksanakan di Desa Oeseli merupakan inisiatif inovatif yang menggantikan mesin diesel dengan teknologi yang bersumber dari tenaga surya untuk mengurangi emisi karbon, mereduksi polusi udara dan suara sekaligus mempromosikan ekowisata.

2. Pemasangan PLTS terpusat maupun individu daerah-daerah yang jauh dari jangkauan dan belum terlayani oleh PLN.

2.8 TUJUAN 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2023:

Tabel 2.14
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua						
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita ADHK.	PDRB Kabupaten Rote Ndao Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023	19,97	0,91	1,85	1,04
8.1.1.(a)	PDB per kapita (Juta)	BPS Rote Ndao	22,04	22,51	23,75	24,89

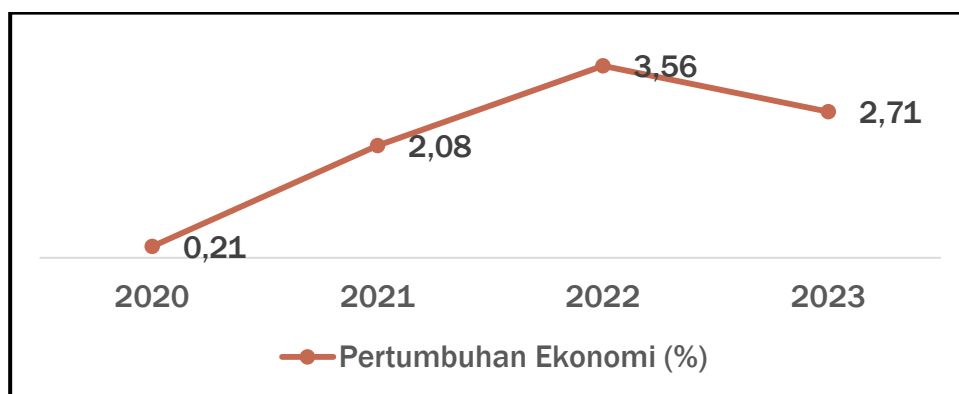
Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja pertahun.	BPS Rote Ndao dan	-13,64	-41,04	0,71	4,18
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) kelayanan keuangan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS Rote Ndao	4,90	3,67	3,64	3,65
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8.6.1*	Persentase usia muda (15- 24) yang sedang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
	tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).					
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB (Milyar)	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rote Ndao Menurut Lapangan Usaha 2019-2023	5,8	6,1	6,6	6,9
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	BPS Rote Ndao	96	51	4.174	6.080
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Rote Ndao	3.510	7.449	5.903	10.135
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata (Milyar)	BPS Rote Ndao	5.9	6.1	6.6	6.9
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industry pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Rote Ndao	0,76	0,39	0,38	0,38
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa.	BPS Rote Ndao	25,62	24,87	24,52	24,52
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	BPS Rote Ndao	5	5	5	5
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas merupakan sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih mandiri dan sejahtera. Kondisi ini perlu disertai dengan tersedianya kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak sehingga tercapai pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Berbagai langkah strategis telah diupayakan untuk memastikan peningkatan nilai tambah berbagai sektor, akselerasi penyerapan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, kondisi kerja layak, perlindungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengembangan sektor pariwisata, serta akses terhadap layanan keuangan.

Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan PDRB



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Pandemi covid-19 berdampak pada perlambatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rote Ndao. Tahun 2020 Pertumbuhan ekonomi sebesar 0,21%. Pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan ekonomi kembali terus meningkat menjadi 2,08% dan 3,56%, namun pada tahun 2023 kembali turun di angka 2,71% angka ini masih jauh dari target minimal 5 persen per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih perlu kerja keras untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Laju pertumbuhan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan mengalami fluktuatif. PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2020 sebesar Rp.13,51 Juta turun menjadi Rp.13,43 juta pada tahun 2021 namun kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023 menjadi Rp.13,81 juta dan Rp.14,00 juta.

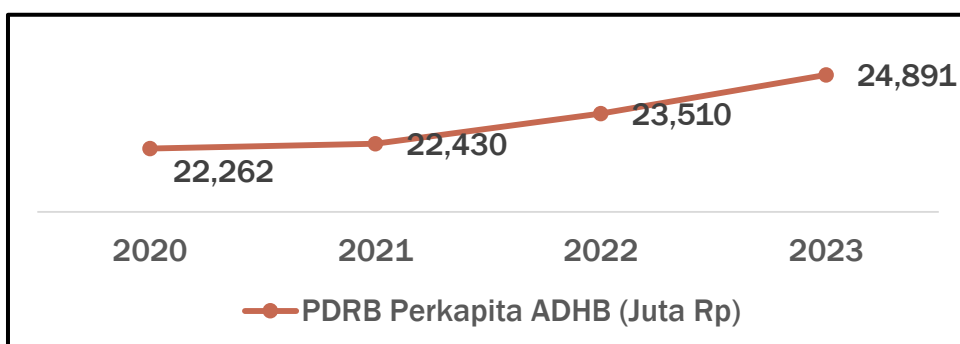
Grafik 2.6 PDRB perkapita ADHK



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2024

PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 sebesar Rp.22.262.000 meningkat menjadi Rp.23.510.000 di tahun 2022 dan Tahun 2023 menjadi Rp.24.891.000.

Grafik 2.7 PDRB perkapita ADHB



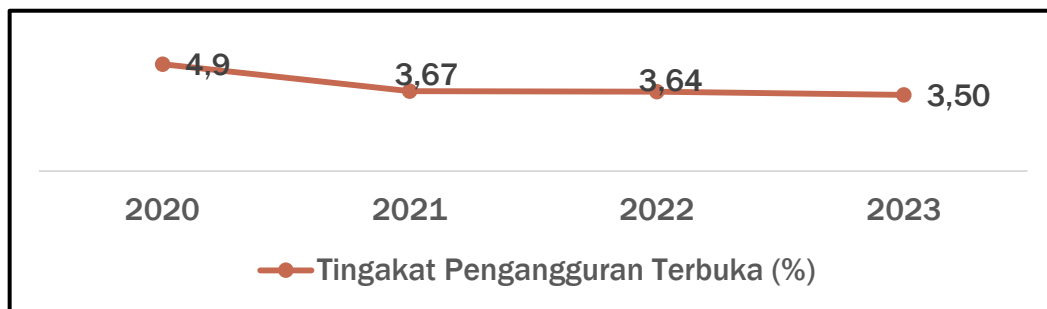
Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Menurut BPS, konsep pengangguran yaitu penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/ pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 juga terkena dampak dari Pandemi COVID-19 karena banyaknya penduduk usia kerja yang tidak bisa terserap dalam pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2020 yang mencapai 4,90% menurun menjadi 3,64% pada tahun

2022 dan mencapai 3,50% di tahun 2023.

Grafik 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka



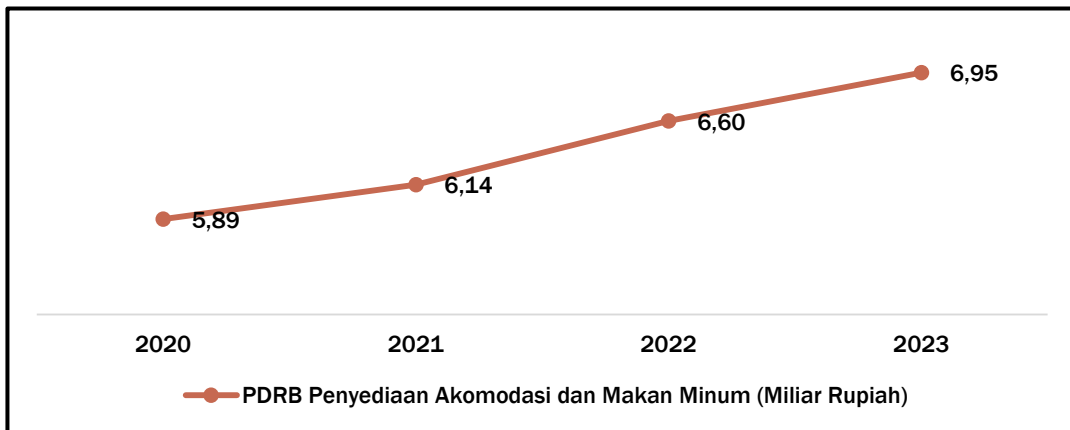
Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2021-2024

Pembangunan sektor pariwisata memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai instrument peningkatan perolehan devisa serta turut memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dari perspektif pembangunan sumber daya manusia, pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrument dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi penduduk sekitar destinasi pariwisata.

Semakin tinggi kontribusi PDB sektor pariwisata, semakin penting pula posisi sektor kepariwisataan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kontribusi ini diupayakan seiring dengan penciptaan lingkungan sosial budaya yang berkualitas, penciptaan rekreasi dan pemanfaatan waktu senggang yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat hidup yang berkualitas.

Di Kabupaten Rote Ndao, nilai PDRB sektor pariwisata yang didekati melalui lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum selalu meningkat dalam rentang tahun 2020 – 2023. Pada tahun 2020, PDRB sektor pariwisata sebesar 5,89 miliar rupiah, tahun 2021 sebesar 6,14 miliar rupiah dan meningkat hingga tahun 2023 mencapai 6,95 miliar rupiah atau PDRB sektor pariwisata berkontribusi sebesar 0,19 persen dari PDRB ADHB tahun 2020-2023.

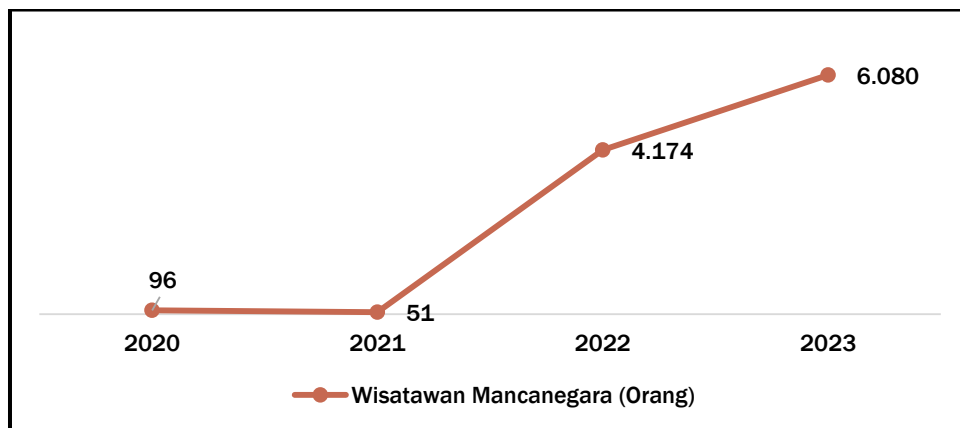
Grafik 2.9 PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Berdasarkan data BPS Kabupaten Rote Ndao, pada tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Rote Ndao ada sebanyak 96 pengunjung, tahun 2021 sebanyak 51 pengunjung dan terus meningkat di tahun 2022 sebanyak 4.174 pengunjung dan tahun 2023 sebanyak 6.080 Pengunjung.

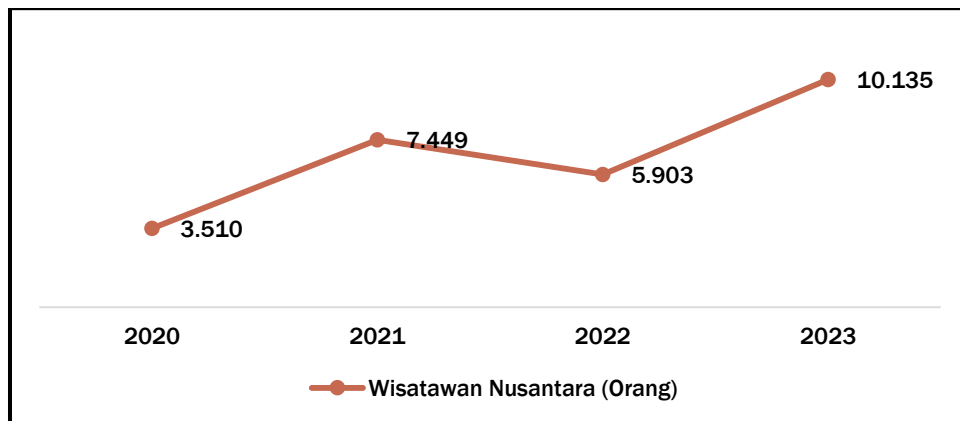
Grafik 2.10 Wisatawan Mancanegara



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2024

pada tahun 2020, jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Rote Ndao ada sebanyak 3.510 pengunjung, tahun 2021 sebanyak 7.449 pengunjung, namun di tahun 2022 turun menjadi 5.903 pengunjung dan tahun 2023 kembali meningkat menjadi 10.135 pengunjung.

Grafik 2.11 Wisatawan Nusantara



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2024

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Strategi:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja
2. Meningkatkan daya saing koperasi UMKM, industri dan perdagangan
3. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan lama tinggal

Kebijakan:

1. Peningkatan keterampilan kompetensi dan kualitas produktivitas tenaga kerja untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha baru yang berdaya saing
2. Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi, Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan industri rumah tangga serta Kemudahan akses permodalan
3. Optimalisasi lahan pertanian dan dukungan infrastruktur, sarana prasarana pertanian yang memadai
4. Meningkatkan pembibitan dan pengembangan serta pakan ternak
5. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan tangkap ,budidaya dan pengolahan hasil perikanan
6. Optimalisasi obyek-obyek wisata alam, bahari, religius, budaya dan kuliner
7. Meningkatkan promosi dan penyelenggaraan event-event wisata.

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan sektor pariwisata didukung oleh pertanian dan perikanan. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat.

Inovasi dan praktik baik dalam pengembangan pertanian adalah mengembangkan gerakan Lakamola Anansio dengan produk unggulan darat pertanian organik dan gula lontar, unggulan laut rumput laut tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan lokal saja, namun mampu pula diantar-pulaukan, melalui:

1. Menyediakan logistik bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara dalam rangka mendukung pariwisata daerah.
2. Sebagai sumber Ketahanan pangan daerah.
3. Menyediakan pangan sehat yang berkelanjutan dengan adanya produk-produk pertanian organik.
4. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai

Salah satu inovasi di bidang pariwisata yaitu Inovasi ANA MONE ANA FETOK EXPLORE ROTE. Perkembangan pariwisata di Indonesia sekarang ini semakin pesat. Perkembangan sektor pariwisata begitu menjanjikan dan memberikan manfaat kepada banyak pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Pariwisata merupakan suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai macam aspek yang penting, aspek tersebut diantaranya yaitu aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek ekonomis, aspek ekologis dan aspek-aspek yang lainnya. Diantara sekian banyak aspek tersebut, aspek yang mendapat perhatian yang paling besar dan hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap sangat penting adalah aspek ekonomisnya.

2.9 TUJUAN 9: INDUSTRI, INOVASI, INFRASTRUKTUR

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Industri, Inovasi dan Infrastruktur Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2023:

Tabel 2.15
Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 9: Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi						
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita (%)	BPS	-4,11	-5,68	4,74	9,83
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur (%)	BPS	-4,11	-5,68	4,74	9,83
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur (Jiwa)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB	Bapelitbang	0,02	0,02	0,03	0,02`
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

Industri merupakan cabang kegiatan ekonomi, sebuah perusahaan atau badan usaha sejenisnya dimana tempat seseorang bekerja. Kegiatan ini diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

1) Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)

Faktor yang berpengaruh terhadap sektor industri pengolahan salah satunya adalah tidak terlepas dari kontribusi investasi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Investasi menjadi titik pokok dalam setiap industri yang mana modal yang besar ikut berpengaruh pada besarnya investasi. Istilah "investasi" mengacu pada pengeluaran dan peningkatan investasi yang dilakukan oleh bisnis dalam memperoleh barang modal dan peralatan produksi guna meningkatkan kapasitas produksi ekonomi. Akibatnya, investasi harus dimasukkan ke dalam pelaksanaan ekonomi daerah, yang akan menghasilkan penciptaan lapangan kerja dan multiplier effect lainnya. Investasi perlu ditingkatkan guna menaikkan nilai tambah industry pengolahan serta meningkatkan nilai PDB.

Industri Pengolahan digolongkan menjadi empat kategori berdasarkan jumlah orang yang terlibat tanpa memperhatikan penggunaan tenaga mesin sebagaimana nilai kapital yang dimiliki oleh industri tertentu. Empat kategori tersebut adalah:

- ❖ Besar : 100 atau >100 pekerja
- ❖ Sedang : 20 - 99 pekerja
- ❖ Kecil : 5 - 19 pekerja
- ❖ Rumah Tangga : 1 - 4 pekerja

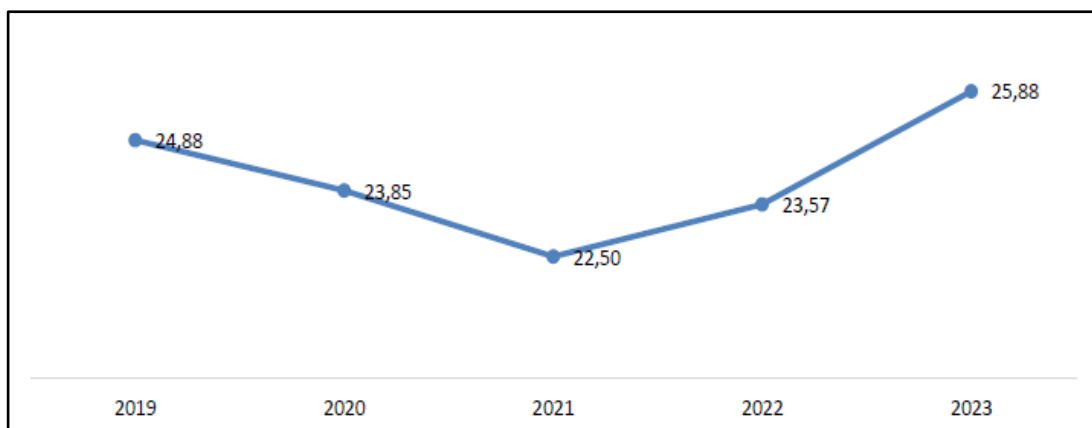
Pembangunan urusan perindustrian yang dilaksanakan meliputi fasilitasi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri, kerjasama kemitraan industri mikro, kecil menengah dengan swasta dan penyediaan sarana prasarana kluster industri. Capaian indikator kinerjanya dapat dilihat dari semakin berkembangnya jumlah produk industri, jumlah pengrajin industri dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kelompok pengrajin.

Industri di Kabupaten Rote Ndao didominasi oleh industri kecil berupa industri rumah tangga yang tersebar di semua kecamatan. Tipe industri berupa produk pertanian, perikanan dan peternakan yang diolah menjadi produk makanan, minuman dan sandang. Pengembangan sektor industri berdasarkan komoditas unggulan di wilayah tersebut yaitu produk pertanian dan perkebunan di Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Timur dan

Kecamatan Rote Selatan. Produk perikanan di Kecamatan Rote Barat Daya dan Kecamatan Lobalain. Produk peternakan di Kecamatan Rote Tengah dan Kecamatan Lobalain. Produk kerajinan dan percetakan di Kecamatan Lobalain. Jumlah industri di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 mencapai 2.614 unit dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 7.425 unit yang terdiri dari industri makanan 5.611 unit, industri sandang 1.024 unit, industri kimia dan bangunan 534 unit, industri logam dan elektronika 52 unit dan industri kerajinan 204 unit.

Industri yang berkembang di Kabupaten Rote Ndao adalah industri kecil dan menengah berupa produk kerajinan tangan dan diversifikasi produk olahan makanan dari sumber daya alam yang tersedia. Dalam rangka pengembangan usaha industri, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pendampingan dan bantuan modal usaha kepada kelompok pengrajin baik kelompok maupun perorangan. Perkembangan indikator kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2.12
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)
Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2023

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Melalui adanya peningkatan investasi dapat berpotensi pada peningkatan total perusahaan yang ada pada sektor industri karena investasi dapat mengembangkan sektor industri tersebut berupa penambahan industri- industri baru dan juga pengembangan industri- industri yang telah berdiri ataupun industri- industri yang baru. Bertambah banyaknya unit usaha akan

berpengaruh pula dalam meningkatkan jumlah barang serta jasa yang akan diproduksi dan bisa membuka peluang kesempatan kerja, sehingga bisa menyerap pekerja dengan semakin banyak, serta akan ikut juga meningkatkan nilai produk domestik bruto melalui hasil output yang berikan. Perkembangan unit usaha sektor industri pengolahan akan mengalami fluktuatif.

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2018 sebesar 0,12 persen sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 1,81 persen. Adapun perkembangan capaian kinerja cakupan bina kelompok pengrajin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Kualitas Layanan Urusan Industri Kabupaten Rote Ndao

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan bina kelompok pengrajin	0,12	0,12	0,08	0,73	1,81

Tujuan Inovasi Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat di dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal. Sampai dengan tahun 2021, Kontribusi PDRB terhadap sektor industri pengolahan sebesar 1,15 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,22 persen. Sektor industri pengolahan meliputi kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, bahan baku industri pengolahan dapat berasal dari pertanian dan perikanan. Sektor industri pengolahan mengalami peningkatan namun kecil, hal ini disebabkan oleh alokasi anggaran yang belum terlalu maksimal.

Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi.

Inovasi yang dimaksud dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan dan berorientasi kepada kepentingan umum.

2.10 TUJUAN 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berkurangnya Kesenjangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2023:

Tabel 2.17
Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2021	Realisasi	
				2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 10 : Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara					
10.1.1*	Koefisien Gini.	BPS	0,390	0,340	0,325
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	DPMD	3	5	7
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	DPMD	42	30	23
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri	P3MD	N/D	N/D	N/D
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	BPS	2,24	3,55	2,71
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	BPS	28,08	27,45	27,05

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2021	Realisasi	
				2022	2023
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	N/A	N/A	N/A	N/A
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	N/A	N/A	N/A	N/A

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

1. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal pada tahun 2021 hingga 2023 cenderung mengalami tren kenaikan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tren rata-rata pertumbuhan ekonomi yang meningkat terjadi pada tahun 2021 yakni 2,24% dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 3,55% tahun 2022 dan angka tersebut terus naik yakni pada tahun 2023 sebesar 2,71%.

Jadi, rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal selama periode tiga tahun dari tahun 2021 hingga tahun 2023 adalah 2,83%.

2. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal pada tahun 2021 hingga 2023 cenderung mengalami penurunan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tren Persentase penduduk miskin pada tahun 2021 yakni sebesar 28,08% dengan presentase penduduk miskin tahun 2022 menurun dibanding tahun sebelumnya yakni 28,08% dan angka tersebut kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 27,45%. Dan pada tahun 2023 terus menurun menjadi 27,05.

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan dan strategi yang dapat diimplementasikan pemerintah untuk meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal antara lain:

1. Pengembangan Infrastruktur

Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur di daerah tertinggal, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan sarana transportasi lainnya. Infrastruktur yang memadai akan memfasilitasi mobilitas barang dan orang, serta mendorong investasi di daerah tersebut.

2. Peningkatan akses ke pendidikan dan kesehatan

Investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan dapat membantu meningkatkan kapabilitas manusia di daerah tertinggal. Pemerintah bisa memberikan dukungan untuk membangun sekolah, meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi, dan memperluas layanan kesehatan agar masyarakat setempat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.

3. Peningkatan Akses ke Sumber Daya Finansial

Memastikan akses ke layanan perbankan dan akses ke sumber daya finansial adalah hal penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal. Pemerintah dapat mendorong lembaga keuangan untuk membuka cabang atau layanan di daerah-daerah terpencil, serta memberikan program dukungan keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

4. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pemerintah memberikan pelatihan, bantuan teknis dan akses ke pasar untuk UMKM, sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing dan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.

5. Pembangunan Ekonomi Berbasis Lokal

Memperkuat sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi unggulan dan dapat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi di daerah tertinggal. Pemerintah bisa mendorong investasi di sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif di wilayah tersebut.

6. Fasilitasi Investasi dan Pengembangan Wilayah

Pemerintah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi di daerah tertinggal. Pengembangan kawasan industri, kawasan pariwisata, atau zona ekonomi khusus di daerah tersebut dapat menarik minat investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

7. Perluasan Akses Teknologi dan Digitalisasi

Peningkatan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta digitalitas dapat membantu menghubungkan daerah tertinggal dengan pasar global dan meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi.

8. Pengembangan Sumber Daya Alam dan Potensi Ekonomi Lokal

Pemerintah perlu memanfaatkan secara bijaksana sumber daya alam dan potensi ekonomi lokal di daerah tertinggal untuk memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kebijakan dan strategi yang dapat diimplementasikan pemerintah untuk Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal antara lain:

1. Peningkatan Akses ke Pendidikan

Memastikan akses yang lebih baik dan berkualitas ke pendidikan di daerah-daerah tertinggal dapat membantu mengangkat taraf hidup penduduk. Program bantuan pendidikan, beasiswa, dan peningkatan infrastruktur sekolah bisa dijadikan fokus untuk meningkatkan akses pendidikan.

2. Pengembangan Infrastruktur

Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, air bersih, sanitasi dan listrik akan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tersebut. Hal ini akan membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup penduduk.

3. Program Pemberdayaan Ekonomi

Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan akses ke pasar akan membantu penduduk lokal untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

4. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan

Memperkuat sistem kesehatan di daerah tertinggal adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi angka kematian akibat penyakit yang dapat dicegah.

5. Pengembangan Pertanian dan Perdesaan

Mengembangkan sektor pertanian dan perdesaan akan membantu mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

6. Program Bantuan Sosial yang Tepat Sasaran

Menyediakan bantuan sosial yang tepat sasaran, seperti program bantuan tunai langsung (*direct cash transfer*) atau program subsidi pangan, untuk membantu penduduk miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka.

7. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan

Jika memungkinkan, pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat lokal di daerah tertinggal.

8. Partisipasi Masyarakat

Melibatkan masyarakat secara aktif dalam merencanakan dan pelaksanaan program pembangunan daerah akan memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

9. Promosi Investasi dan Pengembangan Usaha

Mendorong investasi dan pengembangan usaha di daerah tertinggal akan menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

10. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi keberhasilan dari kebijakan yang diterapkan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menyesuaikan strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Inovasi dan praktik baik yang tepat dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di daerah-daerah tersebut. Berikut adalah beberapa inovasi dan praktik baik yang dapat membantu meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal:

1. Pengembangan Industri dan Sektor Unggulan

Identifikasi sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dan dorong pengembangan sektor-sektor tersebut. Hal ini dapat melibatkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan daya saing, pelatihan tenaga kerja, fasilitasi akses ke pasar, serta penggunaan teknologi modern.

2. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas

Investasi dalam infrastruktur jalan, jembatan, jaringan listrik, dan telekomunikasi akan meningkatkan konektivitas wilayah tertinggal dengan wilayah lainnya, memperlancar pergerakan barang dan orang, serta meningkatkan aksesibilitas ke pasar dan peluang ekonomi.

3. Pendidikan dan Pelatihan

Investasi dalam pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja di daerah tertinggal. Dengan memiliki tenaga kerja yang terampil dan berkualitas, peluang investasi dan produktivitas ekonomi wilayah tersebut akan meningkat.

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pemerintah dapat memberikan akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan dan program kesehatan yang efektif.

5. Inovasi Teknologi dan Digitalisasi

Mendorong adopsi teknologi modern dan solusi digital akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha, memungkinkan akses pasar yang lebih luas, serta membuka peluang usaha baru di sektor digital.

6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Dukungan khusus bagi UMKM di daerah tertinggal, seperti pelatihan manajemen, akses keuangan, dan bantuan teknis, akan meningkatkan daya saing dan kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi lokal.

7. Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah tertinggal. Penting untuk memastikan pelestarian lingkungan dan budaya serta partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata.

8. Kemitraan Publik-Swasta

Membangun kemitraan antara sektor publik dan swasta akan meningkatkan investasi, pengembangan infrastruktur, serta memperluas kesempatan kerja dan akses pasar.

9. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Memastikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan akan mencegah eksploitasi yang merugikan lingkungan dan masyarakat, sambil memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

10. Pelibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi akan memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Mengurangi persentase penduduk miskin di daerah tertinggal merupakan tantangan yang kompleks dan penting dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Inovasi dan praktik baik berikut dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan di daerah-daerah tersebut:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi

Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada pelatihan keterampilan, pendampingan usaha mikro dan kecil, serta akses ke pasar akan membantu masyarakat miskin di daerah tertinggal untuk meningkatkan pendapatan mereka.

2. Sistem Keuangan Inklusif

Mendorong akses ke layanan keuangan seperti perbankan mikro, koperasi, atau layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*) akan membantu penduduk miskin di daerah tertinggal untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan mengakses kredit untuk usaha atau investasi.

3. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan

Memperkuat sektor pertanian di daerah tertinggal dengan teknik pertanian yang berkelanjutan, bantuan teknologi, dan akses ke pasar akan meningkatkan produksi dan pendapatan petani, serta mengurangi tingkat kemiskinan.

4. Pendidikan dan Kesehatan

Investasi dalam pendidikan dan kesehatan akan meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Pendidikan yang baik dapat membuka akses ke peluang kerja yang lebih baik, sementara kesehatan yang lebih baik akan mengurangi beban biaya kesehatan bagi keluarga miskin.

5. Infrastruktur Dasar

Meningkatkan akses ke infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan transportasi akan meningkatkan kualitas hidup penduduk di daerah tertinggal dan membantu mengurangi kemiskinan.

6. Program Jaminan Sosial

Mengimplementasikan program jaminan sosial seperti bantuan sosial tunai, bantuan beras, atau program kesehatan universal akan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan mengurangi risiko jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih dalam.

7. Pengembangan Usaha Berbasis Komunitas: Mendorong pembentukan dan pengembangan usaha berbasis komunitas di daerah tertinggal akan membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan masyarakat.

8. Kemitraan dan Kolaborasi

Membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga swasta, LSM, dan masyarakat sipil akan memperkuat upaya mengatasi kemiskinan di daerah tertinggal. Kolaborasi ini akan memastikan sumber daya dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.

9. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan akan mencegah degradasi lingkungan dan memastikan manfaat dari sumber daya alam dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil.

10. Pemberdayaan Perempuan

Mendorong pemberdayaan perempuan di daerah tertinggal melalui akses kependidikan, keterampilan, dan peluang ekonomi akan meningkatkan peran perempuan dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

11. Pengembangan Aplikasi Penanggulangan Kemiskinan Tulu Fali yang bertujuan untuk pendistribusian bantuan sosial yang adil dan merata dengan prioritas bagi masyarakat miskin.

2.11 TUJUAN 11: KOTA DAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota dan Permukiman Berkelanjutan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2022:

Tabel 2.18
Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan						
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses Terhadap hunian yang layak dan terjangkau (%)	Data Dinas PKPLH	0,45	0,44	0,44	0,44
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) (Skor).	Buku IRBI Tahun 2020 – 2023	142.40	142.40	138.32	117,62
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (Milyar)	BPBD Kab. Rote Ndao	N/A	60,078	N/A	N/A
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani (%)	Data Dinas PKPLH	46,62	54,73	72,49	71,66
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu sasaran Misi III RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, yang didukung dengan strategi peningkatan sarana prasarana perumahan, air bersih dan sanitasi. Pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang bermartabat dengan menyediakan rumah layak huni dan perbaikan penyehatan lingkungan

perumahan yang memenuhi kriteria kesehatan, keamanan dan kenyamanan. Pelaksanaannya adalah pemerintah membangun rumah bagi masyarakat tidak hanya bangunan rumah yang aman, sehat dan layak namun juga disediakan penampung air bersih dan sanitasi layak.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kabupaten Rote Ndao mengalami peningkatan dari 4,63% di tahun 2018 menjadi 56,02% pada tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan pemerintah terkait kewajiban pembangunan RLH dari dana desa sebesar 10 unit, bantuan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat yang mendukung APBD Kabupaten Rote Ndao dalam menangani masalah rumah tidak layak huni. Lebih lanjut mengenai capaian kinerja urusan perumahan dan permukiman di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Kualitas Pelayanan Urusan Perumahan dan Permukiman

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
Rasio Rumah Layak Huni (%)	0,183	0,189	0,188	0,185
Rasio Permukiman layak huni	0,383	0,407	0,037	0,766
Cakupan Ketersediaan rumah layak huni (%)	36,50	49,73	55,62	56,02
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang terjangkau (%)	36,50	49,73	55,62	56,02
Persentase Permukiman yang tertata (%)	0,005	0,005	0,005	0,005
Lingkungan permukiman kumuh	77,33	77,33	342,79	342,79
Luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	77,33	77,33	342,79	342,79
Rumah tangga kumuh perkotaan (%)	3,68	3,68	2,68	2,68
Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya (Ha)	1.582	1.582	1.587,3 6	1.739,8 0
Luas lahan bersertifikat (Ha)	46	103,44	139,36	152,44
Perbaikan Rumah Tidak Layak	4.262	5.602	6.265	6.310

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
Huni (Unit)				

Sumber: Dinas PKPLH dan Dinas PUPR Kab. Rote Ndao Tahun 2023

Adapun realisasi terhadap pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.20
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Rote Ndao

No	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Interpretasi
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100	100	Mencapai target
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	100	-	Tidak ada relokasi

Sumber: Laporan SPM Kab. Rote Ndao Tahun 2023

Indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah realisasinya 100% dari target 2 rumah bantuan akibat bencana alam sedangkan indikator rumah yang direlokasi akibat program pemerintah tidak dilaksanakan karena belum ada kasus yang menyebabkan harus dilakukan relokasi terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana alam.

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Koordinasi pendataan dengan kabupaten/kota terkait updating data rumah tidak layak huni. Meningkatkan Anggaran Pemerintah dalam memfasilitasi penyediaan perumahan yang layak huni, terutama bagi Masyarakat berpenghasilan rendah. Diperlukan pelibatan Kepala Desa dan pekerja dari lokasi setempat untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat salah satu program teknis yaitu Program Penanggulangan Bencana yang kemudian dituangkan dalam Dokumen Perencanaan BPBD Provinsi NTT ke dalam tiga

kegiatan serta beberapa sub kegiatan. Program Penanggulangan Bencana pada tahun 2023 yaitu Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Dalam rangka untuk percepatan pelaksanaan pembangunan pada sektor perumahan dan permukiman Pemerintah Kabupaten melalui OPD Teknis melaksanakan Penyelenggaraan Pembangunan dan Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (RLH) yang pendanaan bersumber dari APBD.

Dalam hal pengurangan resiko bencana maka upaya yang dilakukan adalah dengan Pembinaan dan pelatihan personil teknis secara proporsional, Pemenuhan sarana/prasarana penanggulangan bencana secara memadai, dan memaksimalkan peran Forum PRB sebagai wadah koordinasi lintas sector serta Diseminasi Pengurangan Risiko Bencana dalam peningkatan fungsi lingkungan

2.12 TUJUAN 12: PRODUKSI DAN KONSUMSI BERKELANJUTAN

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2023:

Tabel 2.21
Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
Kabupaten Rote Ndao

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 12 : Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan						
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang di daur ulang (%)	Dinas PKPLH	17,56	54,73	72,49	71,66

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu dipeserlukan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Tahun 2023 hasil perhitungan IKLH Kabupaten Rote Ndao 69,59 poin dengan kategori baik. Untuk IKA kendala yang dialami dalam proses pengukuran adalah terbatasnya tenaga yang kompeten dan keterbatasan peralatan dan fasilitas pendukung sehingga sampel air yang ada harus dibawa ke Kupang untuk diperiksa.

Persentase jumlah sampah yang tertangani meningkat dari tahun 2020 sebesar 17,56% menjadi 71,66% pada tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah armada sampah untuk mengangkut sampah yang ada di kontainer penampung sampah. Pelayanan ini pun hanya untuk wilayah Kota Ba'a. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah personil dan fasilitas pendukung lainnya maka wilayah operasi armada persampahan hanya dibatasi untuk wilayah Perkotaan Ba'a. Terkait pengolahan sampah, Kabupaten Rote Ndao belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), sehingga selama ini yang dilayani hanya pengangkutan sampah selanjutnya dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Desa Oelunggu. Secara detail capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
Kualitas Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	50	60,30	50	51,67
Meningkatnya Pengelolaan Sampah (%)	17,56	54,73	72,49	71,66
Indeks kualitas air (Poin)	50,00	60,30	50,00	51,67

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao Tahun 2024

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Upaya Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengatasi permasalahan sampah di Kota Ba'a yaitu dengan pengadaan Dump Truck 1 Unit, Armroll 2 Unit, Roda Tiga 3 Unit, TPS Kontainer 9 Unit, TPS Bak Permanen 12 Unit, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebanyak 1 TPA, Anggota yang menangani sampah sebanyak 40 anggota petugas kebersihan.

Saat ini lokasi penanganan masih berpusat di Kecamatan Lobalain, adapun jangkauan penanganan sampah saat ini $\pm$ 40,24 KM2 dengan jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 16.565 Jiwa.

Saat ini pemerintah masih kekurangan sarana prasarana pendukung penanganan sampah, adapun kebutuhannya yaitu: Dump truck 4 unit, Armroll 8 unit, Roda 3 12 unit TPS kontainer 38 unit, TPS bak permanen 10 unit, dan usulan Pembangunan TPA dan sanitary landfill yaitu di Desa Maubesi.

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Perlunya inovasi pengolahan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao melalui Dinas PKPLH, meliputi: pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos padat dan kompos cair, eco enzyme, bahan makanan dan pemeliharaan Magot. Sampah plastik diolah menjadi barang kerajinan ada juga sampah plastik dijual ke bank sampah.

2.13 TUJUAN 13: PERUBAHAN IKLIM

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perubahan Iklim Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2023:

Tabel 2.23
Perubahan Iklim

Kode Indikator	Indikator	Sumber Data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya						
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	0	0	0	0

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

Pemanasan global yang terjadi akibat meningkatkan emisi gas rumah kaca ke atmosfer telah menyebabkan perubahan iklim. Pengamatan di beberapa wilayah di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran awal musim, perubahan tinggi maupun keragaman hujan, dan meningkatnya suhu. Kejadian iklim ekstrim juga menunjukkan kecenderungan peningkatan baik dari sisi frekuensi maupun intensitasnya. Beberapa hasil penelitian di NTT menunjukkan bahwa kondisi iklim di propinsi sudah mengalami perubahan. Di beberapa wilayah awal musim sudah mengalami pergeseran dan lama musim hujan cenderung semakin pendek sehingga berpengaruh pada lamanya musim tanam di wilayah tersebut. Intensitas hujan pada musim hujan juga cenderung meningkat sehingga risiko banjir juga meningkat.

Seperti wilayah kabupaten lainnya di NTT, iklim wilayah Rote Ndao dipengaruhi oleh angin muson yang arah dan waktunya dipengaruhi oleh perubahan musim di benua Asia dan Australia. Pengaruh pola angin tersebut menentukan pola musim hujan dan musim kemarau di wilayah Nusa Tenggara, termasuk Kabupaten Rote Ndao.

Musim hujan berlangsung singkat (Desember-Maret), dan musim kemarau berlangsung kurang lebih delapan bulan (April-November). Rata-rata

kelembaban udara juga tergolong rendah, yakni 60-70%. Suhu minimum dan maksimum rata-rata, masing-masing adalah 240 dan 320C. Suhu yang relatif tinggi pada satu sisi dan kelembaban udara yang rendah pada sisi yang lain menyebabkan laju evapotranspirasi yang tinggi. Rata-rata evapotranspirasi potensial adalah 6 mm/hari atau 2160 mm/tahun. Angka evapotranspirasi yang lebih tinggi daripada angka curah hujan mengindikasikan defisit air yang cukup besar, dan berdampak pada rendahnya potensi air permukaan dan air bawah permukaan. Kondisi ini juga berimplikasi pada sistem produksi pertanian yang bersifat musiman dan didominasi sistem pertanian lahan kering atau tadah hujan.

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Adaptasi adalah proses memperkuat dan membangun strategi antisipasi dampak perubahan iklim serta melaksanakannya, sehingga mampu mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya atau dengan kata lain menyesuaikan perubahan. Mitigasi dan Adaptasi merupakan strategi yang saling melengkapi untuk mengurangi dan mengelola risiko perubahan iklim. Adapun tujuan dari adaptasi ini adalah:

- a. Mengurangi tingkat kerentanan (*vulnerability*) dan tingkat keterpaparan (*exposure*) dampak perubahan iklim (*climate risk*)
- b. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang memiliki ketahanan yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim (*Climate Resilience*)

Sementara manfaatnya adalah:

- a. Menghindari dampak perubahan iklim yang lebih besar di masa depan
- b. Mengurangi kerugian ekonomi yang akan ditimbulkan akibat perubahan iklim
- c. Menyiapkan ketahanan masyarakat, wilayah dan juga ekosistem dari ancaman perubahan iklim
- d. Membantu perencanaan pembangunan yang tangguh iklim
- e. Membantu mewujudkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Perlu dilakukan Update terkait Dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) Kabupaten Rote Ndao. RAD-API menjadi acuan

bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta pelaku usaha dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim.

Disamping itu juga lembaga non pemerintah melalui LSM juga melakukan pendampingan atau sosialisasi terkait perubahan iklim dan upaya mitigasi terhadap bencana dan kegiatan lain yaitu pemberian bantuan kapal pariwisata ramah lingkungan kepada masyarakat Desa Oeseli.

2.14 TUJUAN 14: EKOSISTEM LAUT

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ekosistem Laut Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2023:

Tabel 2.24
Ekosistem Laut

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 14 : Menjaga Keberlangsungan Ekosistem Laut						
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan..	DKP	2.797.515,42	2.797.515,42	2.797.515,42	2.797.515,42
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	DKP	1.872	1.875	2.416	3.454

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

Ekosistem laut merupakan salah satu komponen penting dari biosfer yang mendukung kehidupan di bumi. Saat ini, keadaan dan kecenderungan ekosistem laut menghadapi tantangan besar yang disebabkan oleh faktor alamiah maupun aktivitas manusia. Beberapa poin utama mengenai keadaan dan kecenderungan ekosistem laut adalah:

1. Perubahan Iklim

Perubahan iklim global berdampak signifikan pada ekosistem laut, terutama melalui peningkatan suhu air laut. Akibatnya:

- **Pemanasan Laut:** Suhu laut yang lebih hangat mengubah distribusi spesies laut, termasuk pergerakan ikan dan organisme lain yang beradaptasi dengan suhu tertentu.
- **Pemutihan Terumbu Karang:** Terumbu karang mengalami stres karena kenaikan suhu dan tingkat keasaman laut, menyebabkan pemutihan yang merusak habitat bagi banyak spesies.
- **Kenaikan Permukaan Laut:** Berkontribusi terhadap hilangnya habitat pesisir dan berdampak pada keanekaragaman hayati serta komunitas manusia yang bergantung pada laut.

2. Pengasaman Laut

Pengasaman laut terjadi akibat peningkatan penyerapan karbon dioksida (CO₂) dari atmosfer oleh laut. Dampaknya termasuk:

- Penurunan tingkat **pH air laut**, yang mengganggu keseimbangan kimia dan menghambat kemampuan organisme laut, seperti terumbu karang dan moluska, untuk membentuk cangkang dan struktur keras lainnya.
- Spesies plankton yang sangat sensitif terhadap perubahan pH juga mengalami penurunan populasi, yang berdampak pada rantai makanan laut.

3. Overfishing (Penangkapan Ikan Berlebih)

Penangkapan ikan secara berlebihan adalah masalah besar dalam ekosistem laut:

- **Penurunan Populasi Ikan:** Spesies ikan yang bernilai ekonomi tinggi, seperti tuna, cod, dan hiu, mengalami penurunan drastis. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem laut.
- **Bycatch:** Banyak spesies non-target (misalnya lumba-lumba, penyu, burung laut) juga tertangkap dalam aktivitas penangkapan ikan, mengancam keberlanjutan spesies tersebut.

4. Polusi Laut

Laut tercemar oleh berbagai jenis polusi:

- **Sampah Plastik:** Mikroplastik dan sampah plastik di lautan mengancam kehidupan hewan laut. Plastik dapat termakan oleh organisme laut dan masuk ke rantai makanan, termasuk manusia.

- **Tumpahan Minyak:** Insiden tumpahan minyak mengakibatkan kerusakan ekosistem laut dalam waktu lama, mempengaruhi organisme dari fitoplankton hingga mamalia laut.
- **Polusi Nutrien (Eutrofikasi):** Limbah dari pertanian (nitrat dan fosfat) masuk ke laut, menyebabkan pertumbuhan alga berlebih yang dapat menyebabkan zona mati (dead zones), di mana kadar oksigen sangat rendah dan kehidupan laut sulit bertahan.

5. Kehancuran Habitat Laut

Aktivitas manusia seperti pembangunan pesisir, reklamasi lahan, dan penambangan di dasar laut mengancam ekosistem laut:

- **Terumbu Karang:** Selain pemutihan, aktivitas seperti pengambilan karang untuk industri atau pengembangan pesisir mengurangi jumlah terumbu karang yang berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies.
- **Padang Lamun dan Mangrove:** Ekosistem pesisir seperti lamun dan hutan mangrove yang berperan sebagai penyerap karbon dan tempat pembiakan ikan juga terancam oleh kegiatan manusia.

6. Spesies Invasif

Perdagangan internasional dan peningkatan aktivitas pelayaran memperkenalkan spesies asing ke ekosistem laut, yang seringkali mengancam spesies asli. Contohnya, beberapa spesies alga invasif atau predator seperti bintang laut mahkota duri dapat merusak terumbu karang.

7. Konservasi dan Pemulihan

Sejumlah upaya dilakukan untuk melindungi dan memulihkan ekosistem laut:

- **Kawasan Konservasi Laut (Marine Protected Areas - MPAs):** Beberapa area laut dilindungi dari aktivitas manusia untuk memulihkan ekosistem yang rusak dan melindungi keanekaragaman hayati.
- **Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan:** Penetapan kuota penangkapan ikan, serta penerapan metode penangkapan yang lebih ramah lingkungan, adalah langkah untuk menjaga populasi ikan tetap stabil.

Kecenderungan Masa Depan

Ke depan, jika upaya mitigasi perubahan iklim dan perlindungan ekosistem tidak ditingkatkan, kerusakan ekosistem laut diprediksi akan semakin memburuk. Namun, ada kecenderungan meningkatnya kesadaran global akan pentingnya

melindungi laut. Teknologi baru, kebijakan lebih ketat, dan inisiatif internasional dapat membantu memperlambat atau bahkan membalikkan beberapa tren negatif ini jika diimplementasikan dengan serius.

Upaya perlindungan dan konservasi laut yang lebih intensif sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan mendukung kehidupan di bumi secara keseluruhan.

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Guna mewujudkan ekosistem lautan yang lestari di Provinsi NTT khususnya perairan Rote Ndao maka salah satunya adalah memperkuat kebijakan pemerintah pusat melalui keputusan Menteri kelautan dan perikanan nomor 5 tahun 2014 yang mengatur tentang penetapan Kawasan konservasi TNP Laut Sawu dan nomor 6 tentang rencana pengelolaan dan zonasi. Namun guna memastikan aspek ketaatan pelaku usaha dalam pemanfaatan sumberdaya lautan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao telah menerbitkan peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Sempadan Pantai, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Rote Ndao. Adapun strategi yang diharapkan adalah mendorong partisipasi semua pihak yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung untuk secara arif dan bijaksana dalam pemanfaatan potensi sumberdaya lautan agar senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao lebih khusus Dinas Perikanan telah membuat inovasi “Gerakan Mama Bo’i Rote”. Maksud dari inovasi ini adalah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan .melalui penyediaan oleh-oleh ikan olahan. Tujuannya, untuk meningkatkan permintaan masyarakat atas produk perikanan dan meningkatkan asupan gizi yang berasal dari ikan, sehingga berimplikasi pada peningkatan konsumsi ikan nasional. Selain itu, Karena ikan mudah dicerna dan diserap tubuh dengan kekayaan kandungan gizinya maka ikan sangat berperan penting dalam Gerakan Peningkatan Gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

2.15 TUJUAN 15: EKOSISTEM DARATAN

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Ekosistem Daratan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2023:

Tabel 2.25
Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 15 : Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati						
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Pertanian	0,10	0,05	0,22	0
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

Dalam rangka mencapai tujuan ekosistem daratan pada tahun 2030, ditetapkan 12 target yang diukur melalui 25 indikator. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Tabel Target dan Realisasi Terpulihkannya kawasan konservasi (luar kawasan hutan) yang terdegradasi

Ekosistem daratan dapat mengalami berbagai macam keadaan atau kecenderungan, tergantung pada faktor-faktor alamiah dan manusia yang

memengaruhinya. Beberapa keadaan atau kecenderungan ekosistem daratan yang umum meliputi:

1. **Perubahan Iklim:** Perubahan iklim global dapat memiliki dampak signifikan pada ekosistem daratan. Peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, dan perubahan musim dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati, distribusi spesies, dan produktivitas ekosistem daratan.
2. **Deforestasi:** Deforestasi adalah penggundulan hutan secara besar-besaran, yang seringkali dilakukan untuk keperluan pertanian, pertambangan, atau pembangunan. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem daratan, hilangnya habitat, dan meningkatnya risiko erosi tanah.
3. **Urbanisasi:** Pertumbuhan kota dan urbanisasi dapat mengubah ekosistem daratan menjadi kawasan perkotaan. Perubahan ini bisa mengurangi habitat alami, meningkatkan polusi, dan mengubah lingkungan fisik secara drastis.
4. **Fragmentasi Habitat:** Fragmentasi habitat terjadi ketika ekosistem daratan terbagi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh pembangunan infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, atau pemukiman manusia. Hal ini dapat mengganggu pergerakan dan migrasi hewan serta mempengaruhi dinamika populasi.
5. **Perubahan Penggunaan Tanah:** Perubahan penggunaan tanah, seperti konversi lahan pertanian menjadi lahan industri atau komersial, dapat memengaruhi produktivitas dan keanekaragaman ekosistem daratan.
6. **Penyakit dan Penyakit Tumbuhan:** Penyakit hewan dan tumbuhan dapat menyebar melalui ekosistem daratan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Perubahan dalam distribusi penyakit atau patogen tertentu dapat mempengaruhi spesies-spesies tertentu dan ekosistem secara keseluruhan.
7. **Invansi Spesies Asing:** Masuknya spesies-spesies asing yang invasif dapat mengganggu ekosistem daratan dengan menggeser spesies-spesies asli, merusak habitat, dan mengubah dinamika ekosistem.

8. Pengelolaan Sumber Daya: Pengelolaan yang tidak berkelanjutan atau eksploitasi berlebihan sumber daya alam seperti hutan, air tanah, dan tanah pertanian dapat merusak ekosistem daratan.
9. Pelestarian dan Restorasi: Upaya pelestarian dan restorasi ekosistem daratan menjadi penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem yang sehat.
10. Perubahan Ekosistem: Beberapa ekosistem daratan, seperti padang rumput, hutan, dan gurun, memiliki kecenderungan alamiah untuk berubah seiring waktu sebagai respons terhadap perubahan lingkungan fisik dan biologis.

Kecenderungan-kecenderungan ini dapat saling berkaitan dan memengaruhi ekosistem daratan secara kompleks. Penting untuk memahami dan mengelola ekosistem daratan dengan bijak untuk meminimalkan dampak negatif dan mempertahankan keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan.

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Kebijakan dan strategi yaitu antara lain:

1. Menjaga kualitas Lingkungan Hidup, pengendalian pencemaran, keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, menjaga luasan dan fungsi hutan, menyediakan hutan untuk sosial dan ekonomi masyarakat serta merawat keseimbangan ekosistem
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan perlindungan hutan
 Komitmen Pusat melalui Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kabupaten Rote Ndao dalam upaya percepatan pencapaian TPB/SDGs melalui program antara lain:
 - ❖ pengelolaan dan konservasi hutan;
 - ❖ perencanaan dan penatagunaa hutan;
 - ❖ pemanfaatan hutan dan penataan hasil hutan;
 - ❖ pengembangan aneka usaha promosi kehutanan;
 - ❖ pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - ❖ konservasi SDA dan ekosistem;
 - ❖ penyuluhan dan pemberdayaan;
 - ❖ pengelolaan hutan wilayah;
 - ❖ pengembangan pembenihan tanaman hutan;

Kebijakan dan strategi ekosistem daratan adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, organisasi lingkungan, dan masyarakat untuk melindungi, mengelola, dan mempertahankan ekosistem daratan yang penting bagi keanekaragaman hayati, ekonomi, dan kesejahteraan manusia. Berikut beberapa contoh kebijakan dan strategi yang umum digunakan dalam pengelolaan ekosistem daratan:

1. **Konservasi Habitat:** Kebijakan dan strategi ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan habitat alami seperti hutan, padang rumput, rawa, dan gurun. Ini dapat mencakup pembuatan taman nasional, cagar alam, dan kawasan konservasi lainnya serta penerapan aturan ketat terhadap aktivitas yang dapat merusak habitat.
2. **Restorasi Ekosistem:** Program restorasi bertujuan untuk mengembalikan ekosistem daratan yang telah rusak atau terdegradasi menjadi kondisi semula. Ini dapat melibatkan penanaman kembali vegetasi, rehabilitasi lahan, dan pengendalian spesies invasif.
3. **Pengelolaan Berkelanjutan:** Strategi ini mencakup praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan, lahan pertanian, dan air tanah. Tujuannya adalah memastikan bahwa sumber daya ini dapat digunakan jangka panjang tanpa merusak ekosistem.
4. **Pemberian Label Ekologis:** Program pemberian label ekologis atau sertifikasi ekologis memberikan insentif kepada produsen dan konsumen untuk mengadopsi praktik-praktik yang ramah lingkungan. Contohnya adalah sertifikasi hutan berkelanjutan dan pertanian organik.
5. **Pengendalian Spesies Invasif:** Strategi ini fokus pada pengendalian dan manajemen spesies invasif yang dapat mengancam ekosistem daratan asli. Ini melibatkan pemantauan dan upaya untuk mengurangi populasi spesies invasif.
6. **Kebijakan Perubahan Iklim:** Kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengadaptasi ekosistem daratan terhadap perubahan iklim yang sedang terjadi.

7. Pembangunan Berkelanjutan: Memasukkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan perkotaan dan pedesaan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem daratan.
8. Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Program pendidikan dan kesadaran lingkungan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekosistem daratan dan mendorong tindakan yang mendukung keberlanjutan.
9. Kebijakan Pertanahan: Pengaturan dan kebijakan terkait pertanahan, termasuk hak kepemilikan, penggunaan tanah, dan tata guna lahan, dapat memiliki dampak besar pada ekosistem daratan.
10. Kebijakan Perlindungan Satwa Liar: Kebijakan untuk melindungi satwa liar dan spesies yang terancam punah, termasuk upaya untuk menghentikan perdagangan ilegal satwa liar.

Kebijakan dan strategi ini dapat bervariasi secara signifikan antara negara-negara dan wilayah-wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tantangan ekologis yang ada. Yang penting adalah menggabungkan berbagai pendekatan ini untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan ekosistem daratan yang berkelanjutan.

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Inovasi dan praktik baik dalam pengelolaan ekosistem daratan sangat penting untuk mempertahankan keanekaragaman hayati, mendukung keberlanjutan, dan melindungi lingkungan. Berikut adalah beberapa contoh inovasi dan praktik baik dalam pengelolaan ekosistem daratan:

1. **Agroforestri:** Agroforestri adalah praktik pertanian yang mengintegrasikan pohon-pohon dalam sistem pertanian. Ini meningkatkan produktivitas lahan, meningkatkan penyimpanan karbon, dan mempertahankan keanekaragaman hayati.
2. **Revegetasi:** Melalui penanaman ulang vegetasi asli di lahan yang terdegradasi atau terpengaruh oleh kebakaran hutan atau aktivitas manusia, seperti pertambangan, dapat membantu memulihkan ekosistem daratan.

3. **Pengelolaan Air:** Praktik yang baik dalam pengelolaan air, seperti teknik irigasi yang efisien, pengolahan air limbah, dan restorasi ekosistem sungai, dapat membantu memelihara kualitas air dan mengamankan pasokan air yang berkelanjutan.
4. **Pengelolaan Hutan Berkelanjutan:** Sistem pengelolaan hutan yang berkelanjutan memastikan bahwa hutan digunakan secara bijak, dengan penanaman kembali pohon yang ditebang dan perlindungan terhadap habitat satwa liar.
5. **Konservasi Habitat:** Melindungi dan melestarikan habitat alami, seperti taman nasional, cagar alam, dan kawasan konservasi lainnya, adalah praktik baik yang krusial dalam melindungi keanekaragaman hayati ekosistem daratan.
6. **Pengendalian Spesies Invasif:** Upaya untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan jika mungkin, membasmi spesies invasif yang merusak ekosistem daratan.
7. **Penggunaan Lahan Berkelanjutan:** Pengembangan perkotaan dan pertanian yang memperhatikan tata guna lahan yang berkelanjutan, termasuk pelestarian kawasan hijau perkotaan dan praktik pertanian organik.
8. **Teknologi Monitoring:** Inovasi dalam teknologi pemantauan, seperti penginderaan jauh dan sensor, memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap perubahan ekosistem daratan dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.
9. **Pembangunan Berkelanjutan:** Praktik pembangunan berkelanjutan yang memasukkan konsep tata kota yang ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, dan pengurangan limbah sangat penting untuk melindungi ekosistem daratan di lingkungan perkotaan.
10. **Konservasi Air dan Tanah:** Praktik-praktik untuk konservasi air dan tanah, seperti pengendalian erosi, pelestarian wetland, dan pengelolaan sumber daya air, dapat membantu melindungi dan mempertahankan ekosistem daratan.
11. **Pendekatan Partisipatif:** Melibatkan masyarakat lokal, pemangku kepentingan, dan kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan praktik pengelolaan ekosistem daratan.

12. Pendidikan Lingkungan: Pendidikan dan kesadaran lingkungan yang kuat dapat membantu mempromosikan kesadaran akan pentingnya ekosistem daratan dan mendorong tindakan berkelanjutan.

Inovasi dan praktik baik ini dapat bervariasi tergantung pada konteks geografis dan lingkungan, tetapi secara umum, mereka berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem daratan dan memastikan kesejahteraan manusia jangka panjang.

2.16 TUJUAN 16: PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2023:

Tabel 2.26
Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2021	Realisasi	
				2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 16 : Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan					
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	BPS	N/D	N/D	N/D
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	N/A	N/A	N/A	N/A
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban Kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	N/A	N/A	N/A	N/A

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2021	Realisasi	
				2022	2023
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	N/A	N/A	N/A	N/A
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DP3P2K B	N/A	N/A	N/A
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DP3P2K B	0,08	0,12	0,06
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	DP3P2K B	0,48	0,63	1,02
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS/Inspektorat Daerah	94,33	94,85	95,04
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui (%)	BKA	N/D	N/D	N/D
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan	BKA	WTP	WTP	WTP

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2021	Realisasi	
				2022	2023
	Pemerintah Daerah Kabupaten.				
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten.	Bagian Organisasi	CC	CC	CC
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan <i>E-procurement</i> terhadap belanja pengadaan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	N/D	N/D	N/D
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SEKWAN	0	0	0
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPP	0,06	0,06	0,06
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	BPS/ Dukcapil	77,19	83,45	87,05

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2021	Realisasi	
				2022	2023
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	N/A	N/A	N/A	N/A
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	BPS/Duk capil	74,7	84,56	86,8
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	N/A	N/A	N/A	N/A
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	N/A	N/A	N/A	N/A

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

1. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami tren kenaikan. Menurut data Badan Keuangan Daerah Kabupaten Rote Ndao, tren Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

pada tahun 2021 yakni Wajar Dengan Pengecualian (WTP) dan selama dua tahun terakhir yakni tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten pada tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami tren kenaikan yakni CC dan pada tahun 2024 nilai SAKIP yakni B, Menurut data dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2021 nilai 51,07 predikat CC, tahun 2022 meningkat dengan nilai 53,89 Atau predikat CC, tahun 2023 meningkat dengan nilai 55,08 atau predikat CC dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dengan nilai 60.10 atau predikat B (Baik).

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Kebijakan dan strategi pemerintah tentang indikator Persentase Peningkatan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten mencakup langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat opini WTP pada laporan keuangannya. Berikut adalah beberapa poin dalam kebijakan dan strategi tersebut:
 - a) Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hal ini mencakup menyediakan informasi keuangan yang lengkap, akurat, relevan, dan dapat diverifikasi.
 - b) Penerapan Standar Akuntansi yang Berlaku
Pemerintah daerah harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangannya. Hal ini memastikan konsistensi dan transparansi dalam pelaporan keuangan.
 - c) Pengelolaan Keuangan yang Baik
Pemerintah daerah harus memiliki mekanisme pengelolaan keuangan yang baik dan transparan. Ini termasuk pengelolaan anggaran yang efisien, pemantauan pengeluaran, dan pengendalian terhadap risiko keuangan.

- d) **Penyusunan Laporan Keuangan Tepat Waktu**
Pemerintah daerah harus menetapkan batas waktu yang tepat untuk penyusunan laporan keuangan dan memastikan bahwa laporan tersebut diselesaikan sesuai jadwal.
 - e) **Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas**
Pemerintah daerah harus memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada staf terkait dalam penyusunan laporan keuangan, agar mereka memiliki pemahaman yang baik tentang standar akuntansi dan proses pelaporan.
 - f) **Kolaborasi dengan Auditor Independen**
Pemerintah daerah harus menjalin kolaborasi yang baik dengan auditor independen yang bertugas untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Keterlibatan auditor independen ini akan membantu memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun secara benar dan dapat dipercaya.
 - g) **Tindak Lanjut atas Rekomendasi Auditor**
Jika ada temuan atau rekomendasi dari auditor independen terkait penyusunan laporan keuangan, pemerintah daerah harus melakukan tindakan perbaikan dan tindak lanjut untuk memperbaiki masalah tersebut.
 - h) **Penghargaan dan Pengakuan atas Opini WTP**
Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan dan pengakuan kepada tim yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan yang mendapatkan opini WTP sebagai bentuk apresiasi dan dorongan untuk konsistensi dalam pelaporan keuangan.
2. **Kebijakan dan strategi pemerintah tentang indikator Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten mencakup langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memperkuat implementasi SAKIP. SAKIP adalah sistem yang dirancang untuk mengukur dan memantau kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, serta meningkatkan akuntabilitas publik. Berikut adalah beberapa poin yang mungkin termasuk dalam kebijakan dan strategi tersebut:**

- a) Penetapan Tujuan dan Indikator Kinerja: Pemerintah daerah harus menetapkan tujuan pembangunan yang jelas dan indikator kinerja yang terukur dan dapat diukur. Hal ini penting untuk mengidentifikasi apa yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dan bagaimana pencapaian tersebut akan diukur.
- b) Integrasi Program dan Anggaran: Kebijakan ini mencakup integrasi antara program pembangunan dan anggaran pemerintah daerah. Artinya, alokasi anggaran harus didasarkan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dan ada keterkaitan yang jelas antara alokasi anggaran dengan pencapaian indikator kinerja.
- c) Partisipasi Publik: Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Partisipasi publik ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, forum musyawarah, atau kegiatan partisipatif lainnya.
- d) Monitoring dan Evaluasi: Strategi ini mencakup penguatan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Data terkait pencapaian indikator kinerja harus dikumpulkan secara teratur dan dianalisis untuk mengevaluasi kemajuan dan dampak program pembangunan.
- e) Pembinaan dan Pelatihan: Pemerintah daerah harus memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pegawai terkait implementasi SAKIP. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pegawai dalam menggunakan sistem akuntabilitas kinerja ini dengan baik.
- f) Keterbukaan Informasi: Strategi ini mencakup kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan keterbukaan dan aksesibilitas informasi terkait kinerja pemerintah. Laporan kinerja dan hasil evaluasi program pembangunan harus dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan transparan.
- g) Penyusunan Laporan Kinerja: Pemerintah daerah harus menyusun laporan kinerja secara berkala, yang mencakup hasil pencapaian indikator kinerja dan penjelasan mengenai upaya yang dilakukan untuk

mencapainya. Laporan ini menjadi sarana akuntabilitas publik dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran publik.

- h) Pemberian Insentif dan Sanksi: Pemerintah daerah dapat memberikan insentif bagi unit kerja atau program yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. Di sisi lain, sanksi dapat diberlakukan bagi unit kerja atau program yang tidak mencapai target kinerja atau tidak melaksanakan SAKIP dengan baik.

Kebijakan dan strategi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi SAKIP yang efektif dan berkelanjutan. Dengan memperkuat sistem akuntabilitas kinerja, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, SAKIP yang baik juga dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

1. Inovasi dan praktik baik terhadap indikator Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dapat berfokus pada meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Berikut adalah beberapa contoh inovasi dan praktik baik yang dapat membantu mencapai opini WTP atas laporan keuangan:
 - a) Penggunaan Teknologi Informasi: Menerapkan teknologi informasi yang canggih dapat mempercepat proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Penggunaan perangkat lunak akuntansi terintegrasi dan sistem informasi manajemen keuangan yang baik akan memudahkan pengelolaan dan pelaporan data keuangan dengan akurasi tinggi.
 - b) Implementasi Standar Akuntansi Internasional: Mengadopsi standar akuntansi internasional yang diakui secara global, seperti *International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS), dapat membantu meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam penyusunan laporan keuangan. Standar-standar ini memastikan bahwa laporan keuangan

pemerintah terdiri dari informasi yang relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan dengan pemerintah lainnya.

- c) Tim Audit Internal yang Kompeten: Membentuk tim audit internal yang kompeten dan independen akan membantu memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah berjalan dengan baik. Tim ini dapat melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan keuangan, serta mengidentifikasi potensi penyimpangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki.
- d) Kolaborasi dengan Auditor Eksternal: Menjalinkan kerja sama yang baik dengan auditor eksternal akan membantu pemerintah untuk lebih memahami persyaratan audit dan fokus pada area yang perlu ditingkatkan. Kolaborasi ini juga akan memfasilitasi proses audit eksternal dan mempercepat penerbitan opini atas laporan keuangan.
- e) Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Menginvestasikan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan keuangan akan meningkatkan kemampuan pegawai dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan. Pegawai yang terampil dan kompeten akan mengurangi risiko kesalahan dan ketidaktepatan dalam pelaporan.
- f) Komitmen Pimpinan: Komitmen dari kepala pemerintahan dan para pejabat tinggi untuk menerapkan praktik keuangan yang baik akan menjadi contoh bagi seluruh staf dan memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas diutamakan dalam semua aktivitas keuangan.
- g) Audit Internal Terpadu: Melakukan audit internal terpadu dengan melibatkan berbagai unit atau bagian dalam pemerintah daerah dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan ketidaksesuaian lebih dini. Ini akan memungkinkan tindakan perbaikan diambil secara tepat waktu.
- h) Peningkatan Transparansi Publik: Memastikan bahwa laporan keuangan dan hasil audit dipublikasikan dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat. Ini akan memberikan kesempatan bagi warga untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam proses akuntabilitas pemerintah.

Dengan menerapkan inovasi dan praktik baik tersebut, pemerintah dapat meningkatkan kemungkinan mendapatkan opini WTP atas laporan

keuangannya. Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat diandalkan, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

2. Inovasi dan praktik baik terhadap indikator Persentase Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat berfokus pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam implementasi SAKIP. Berikut adalah beberapa contoh inovasi dan praktik baik yang dapat membantu mencapai peningkatan SAKIP:
 - a) Penggunaan Teknologi Informasi: Mengintegrasikan teknologi informasi dalam SAKIP dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data kinerja. Penggunaan aplikasi dan perangkat lunak khusus untuk manajemen kinerja akan memudahkan pemantauan secara *real-time* dan memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu.
 - b) Penerapan *Balanced Scorecard*: Mengadopsi konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi dan mengukur kinerja dari berbagai perspektif, seperti perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan BSC, pemerintah dapat memiliki gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja mereka.
 - c) Partisipasi Publik dalam Penetapan Indikator Kinerja: Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam proses penetapan indikator kinerja akan memastikan bahwa indikator yang dipilih mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, pertemuan terbuka, atau survei kepuasan masyarakat.
 - d) Pembinaan dan Pelatihan bagi Pegawai: Memberikan pembinaan dan pelatihan secara teratur kepada pegawai terkait SAKIP akan meningkatkan pemahaman mereka tentang sistem dan proses yang terlibat. Pegawai yang terampil akan lebih mampu mengelola data dan informasi kinerja dengan baik.

- e) Sistem Penghargaan dan Pengakuan: Menerapkan sistem penghargaan dan pengakuan bagi unit kerja atau individu yang mencapai kinerja yang baik akan memberikan insentif bagi pihak yang terlibat dalam implementasi SAKIP dengan baik. Ini akan meningkatkan motivasi dan semangat dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- f) Audit Internal Independen: Melibatkan tim audit internal independen yang tidak terkait langsung dengan unit kerja yang dievaluasi dapat meningkatkan objektivitas dan keakuratan dalam proses evaluasi kinerja. Tim ini akan memberikan pandangan yang obyektif tentang efektivitas SAKIP.
- g) Penyampaian Informasi Kinerja secara Terbuka: Memastikan bahwa informasi kinerja dan hasil evaluasi SAKIP dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka dan mudah. Ini akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik.
- h) Pembelajaran dan Perbaikan Berkelanjutan: Melakukan proses pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi kinerja akan memastikan bahwa SAKIP terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Pembelajaran dari pengalaman masa lalu akan membantu pemerintah daerah mengatasi hambatan dan mengoptimalkan kinerja di masa mendatang.
- i) Aplikasi E-Vali Malole: Aplikasi ini untuk memudahkan proses verifikasi dan validasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).

Dengan menerapkan inovasi dan praktik baik tersebut, pemerintah daerah kabupaten dapat meningkatkan SAKIP mereka, mengukur dan mengelola kinerja mereka dengan lebih efektif, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Peningkatan SAKIP ini akan membawa dampak positif pada pembangunan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2.17 TUJUAN 17: KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

Berikut penjabaran tabel Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2023:

Tabel 2.27
Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
Target Pencapaian Indikator tujuan 17 : Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan						
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS Kab. Rote Ndao	93,45	100	94,05	98,28
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPSD sebagai rujukan utama.	BPS Kab. Rote Ndao	90,32	96,97	90,63	100
17.18.1.(c)	Jumlah meta data kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS Kab. Rote Ndao	6	6	6	6
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

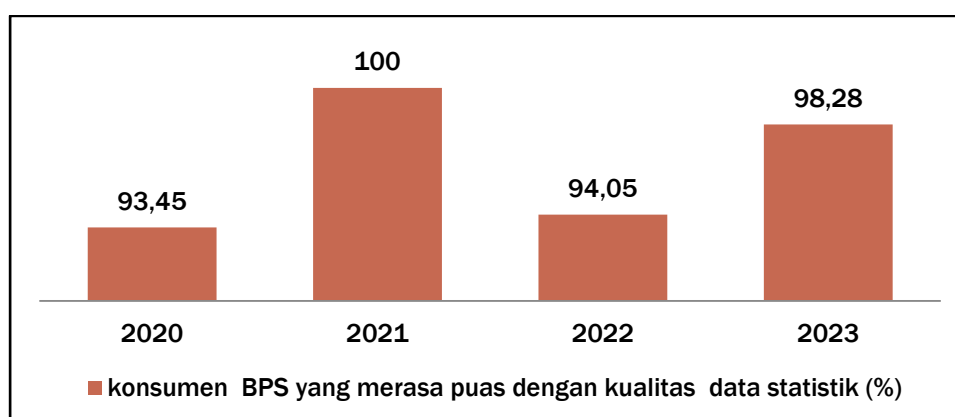
Kode Indikator	Indikator	Sumber data	Base Line 2020	Realisasi		
				2021	2022	2023
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian(Vital Statistics Register).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS Kab. Rote Ndao	7.054	7.912	9.626	19.455
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS Kab. Rote Ndao	93,26	100	100	100

A. KEADAAN DAN KECENDERUNGAN (TREN)

Meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah. Target terkait data statistik di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan kecenderungan yang positif antara lain indikator terkait jumlah pengguna data untuk perencanaan pembangunan yang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir serta terjadinya perbaikan manajemen dan pelayanan data oleh BPS juga telah berkontribusi pada kepuasan pengguna data.

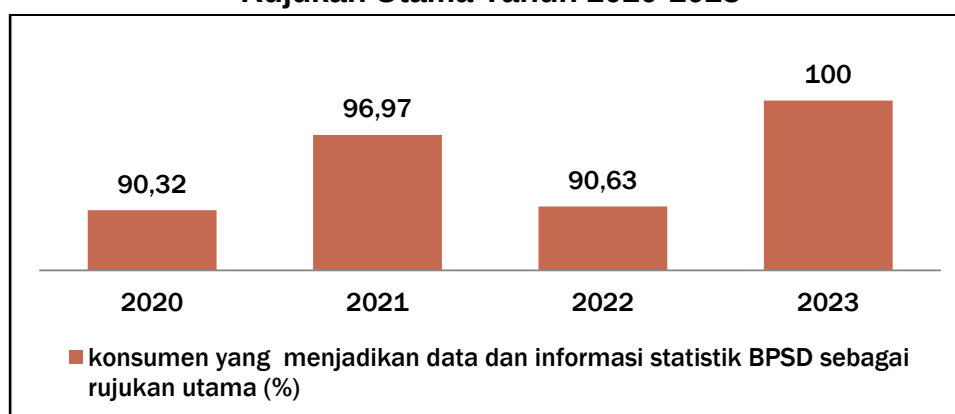
Grafik 2.13
Konsumen BPS yang Merasa Puas dengan Kualitas Data Statistik
Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2021-2023

Kepuasan merupakan refleksi pengguna jasa setelah menggunakan jasa BPS sebagai penyedia data. Gambar di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir kepuasan konsumen data terhadap kualitas data BPS Kabuapten Rote Ndao 93%- 100%. Konsumen yang merasa puas dengan kualitas data BPS ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna memberikan pelayanan publik yang optimal.

Grafik 2.14
Konsumen BPS yang Menjadikan Data dan Informasi Statistik BPSD sebagai
Rujukan Utama Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2021-2023

Data dan informasi statistik BPS dimanfaatkan oleh pengguna untuk berbagai hal. Pada tahun 2020, sebesar 90,32 persen pengguna data memanfaatkan data BPS sebagai rujukan utama. Tahun 2021 meningkat menjadi 96,97% dan tahun 2022 turun menjadi 90,63%. Semakin banyak pengguna menjadikan data

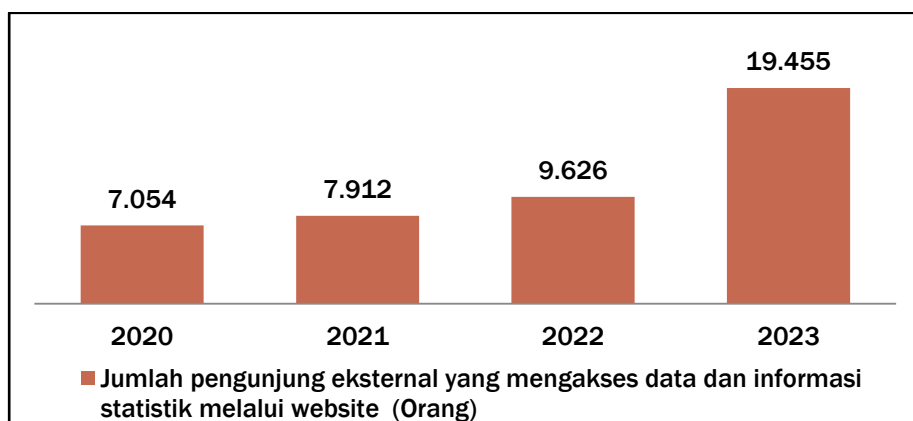
dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama maka dapat dikatakan BPS menyediakan data yang berkualitas, up to date, dan dapat dipercaya.

Indikator 17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).

Pada tahun 2020 hingga 2021, jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral dan khusus yang dihimpun oleh BPS berjumlah sama yakni sebanyak 6.

Indikator 17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.

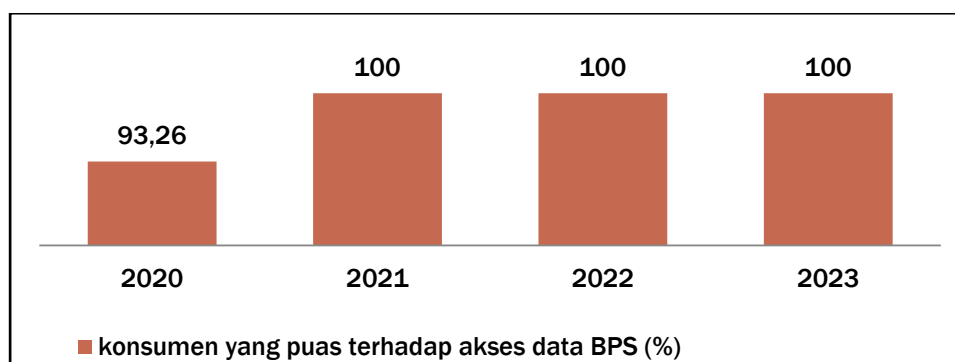
Grafik 2.15
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2021-2023

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website terus mengalami peningkatan yakni sebanyak 7.054 orang di tahun 2020, 7.912 orang di tahun 2021 9.626 Orang di tahun 2022 dan 19.455 Orang di tahun 2023.

Grafik 2.16
Presentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2021-2023

Presentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS pada 2020 sebesar 93,26%. Sedangkan pada tahun 2021, tahun 2022 mencapai 100% dan 100% 2023.

B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

STRATEGI:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan swasta
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data
3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima

KEBIJAKAN:

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas
2. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS
3. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik

C. INOVASI DAN PRAKTIK BAIK

Data dan Informasi statistik dapat diakses melalui website <https://rotendaokab.bps.go.id/> Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao menginisiasi lahirnya layanan *one stop Portal* atau *single window* yang menjadi sistem yang mengintegrasikan semua layanan publik ke dalam satu aplikasi. Yang diberi nama Rote Smart Service. Hanya dengan menginstal satu aplikasi berbagai layanan publik dapat diakses. Prinsip sistem ini adalah *single window*, *single id* dan *single sign in*. Masyarakat tidak perlu lagi memiliki username yang berbeda - beda namun dengan cukup satu username. Untuk saat ini *Rote Smart Service* sudah menghadirkan layanan Portal Berita, Layanan Pengaduan, Layanan Informasi Wisata, layanan Belanja Online dikhususkan bagi produk Rote yang dijual oleh Dekranasda, Layanan Daftar hadir Online, Layanan kontak darurat, Layanan data terbuka Masyarakat

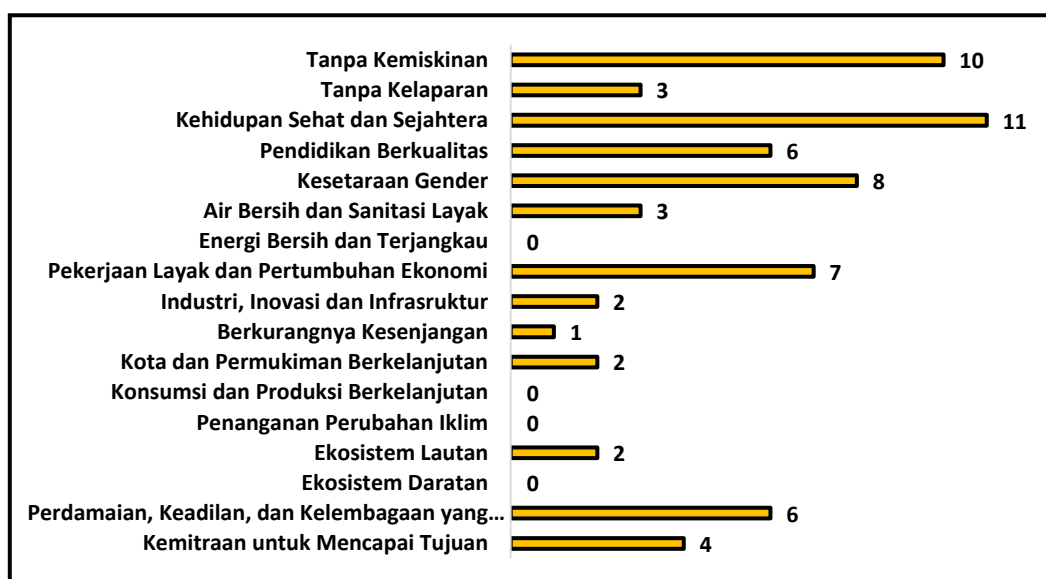
Rote Ndao juga secara aktif dapat berpartisipasi dalam pembangunan Rote ndao melalui kontribusi Aspirasi, pengaduan layanan publik atau permintaan informasi dan data melalui AFADA.

2.18 ANALISIS PENCAPAIAN TPB/SDGs KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

A. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional Tahun 2024

Dalam pelaksanaan pencapaian TPB Kabupaten Rote Ndao telah mencapai 65 indikator yang sudah mencapai target nasional atau sebesar 37,5 % dari 173 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Rote Ndao. Berikut penjabaran pada grafik 2.17

Grafik 2.17
Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

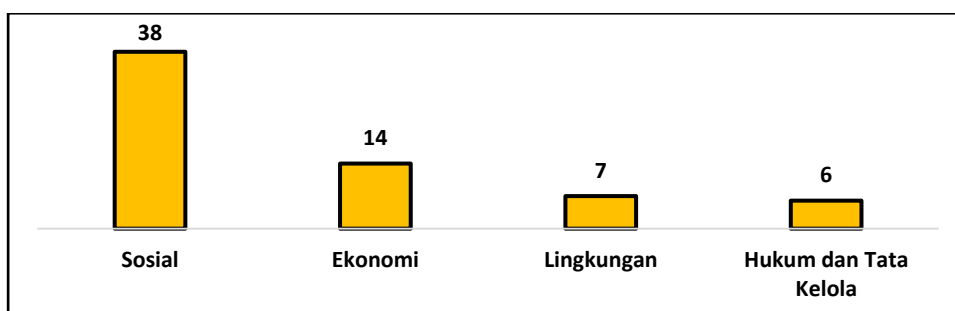


Berdasarkan Grafik 2.17 di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dengan jumlah indikator TPB paling banyak yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional adalah tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 5 (Mencapai kesetaraan gender) dan Tujuan 8 (Pekerjaan Layak Pertumbuhan Ekonomi).

Indikator terbanyak yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional adalah Pilar Sosial sebanyak 38 indikator, Pilar Ekonomi sebanyak 14

indikator, Pilar lingkungan sebanyak 7 indikator dan pilar hukum dan tata kelola (hutakel) sebanyak 6 indikator. Jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional ditunjukkan pada Grafik 2.18 berikut:

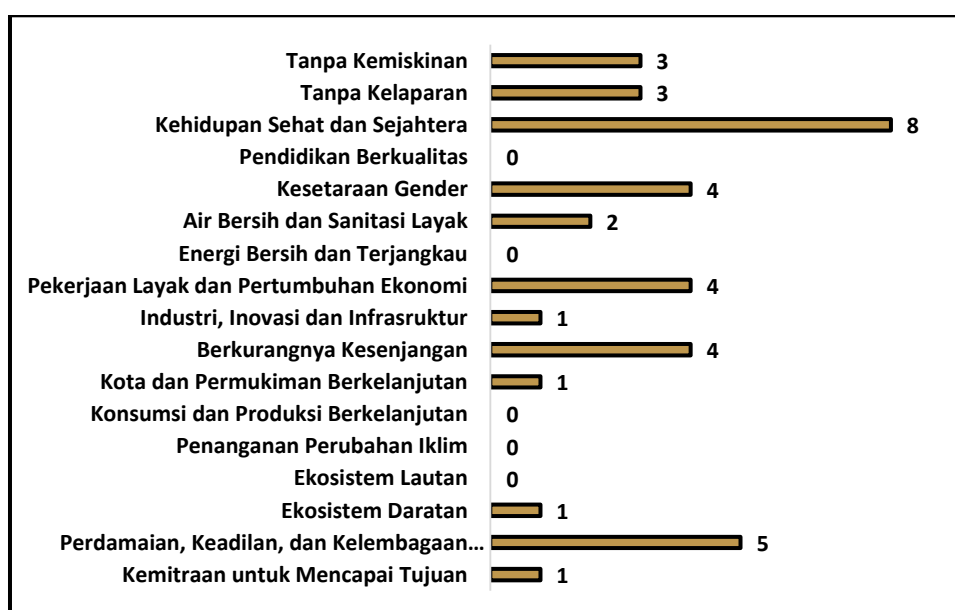
Grafik 2.18
Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional



B. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional Tahun 2020

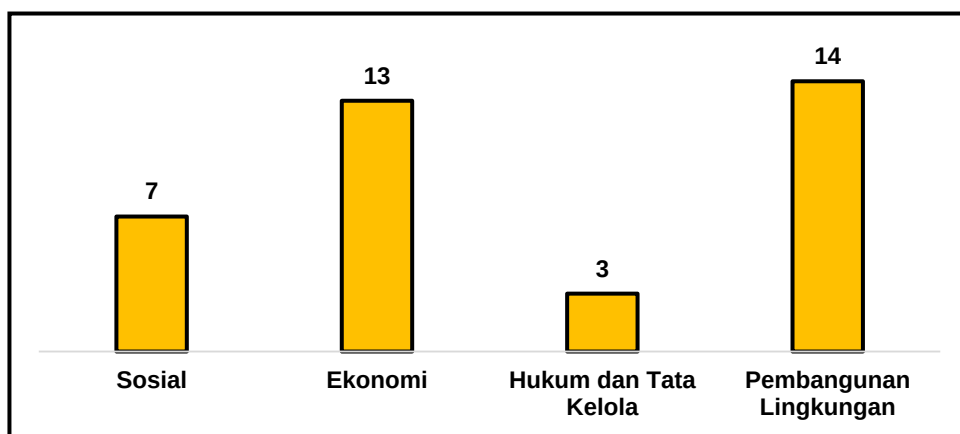
Kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional mencapai 37 indikator dari 173 indikator. Jumlah tujuan dan target TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional disajikan pada Grafik 2.19 berikut.

Grafik 2.19
Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa tujuan dengan jumlah indikator TPB paling banyak yang sudah dilaksanakan dan namun belum mencapai target nasional adalah Tujuan 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera) sebanyak 8 indikator, Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan) sebanyak 5 indikator, Tujuan 5, 8 dan 10 yaitu Kesetaraan Gender, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan Bekurangnya Kesenjangan masing-masing sebanyak 3 indikator. Tujuan 1 dan 2 (Tanpa Kemiskinan dan Tanpa Kelaparan) masing-masing sebanyak 3 indikator, Tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak) sebanyak 2 indikator, Tujuan 9, 11,15 dan 17 (Industri Inovasi dan Infrastruktur, Kota dan Permukiman Berkelanjutan, Ekosistem Daratan dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) masing-masing sebanyak 1 indikator. Berikut gambaran pilar-pilar yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dapat dilihat pada grafik 2.20 di bawah ini:

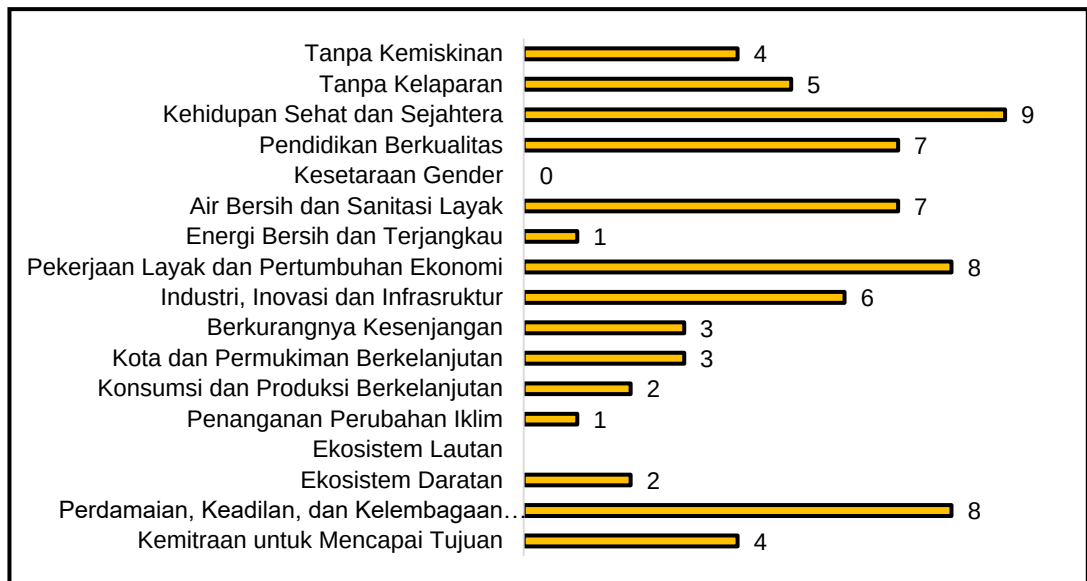
Grafik 2.20
Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional



C. Indikator TPB yang Tidak atau Belum Ada Data

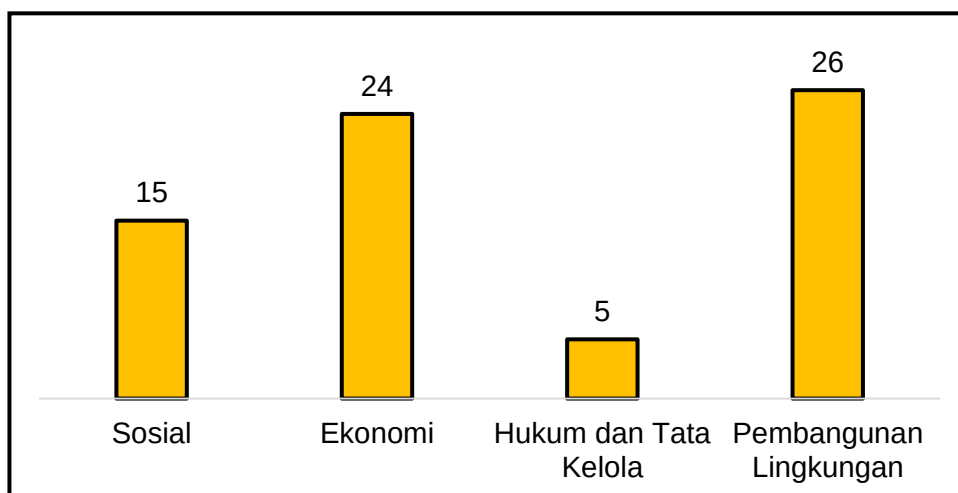
Kategori indikator TPB yang tidak atau belum ada data sebanyak 70 indikator yang berturut-turut dari yang terbesar angkanya terdiri atas Tujuan 3 dan 16 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera/Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 4 dan 6 (Pendidikan Berkualitas/Air Bersih dan Sanitasi Layak), serta tujuan-tujuan lainnya. Jumlah indikator pada setiap tujuan yang masuk dalam kategori indikator TPB yang tidak atau belum ada data ditunjukkan pada Grafik 2.21.

Grafik 2.21
Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional



Indikator TPB yang tidak atau belum ada data untuk mencapai target nasional terdiri dari pilar pembangunan lingkungan sebanyak 26 indikator, Pilar ekonomi sebanyak 24 indikator, Pilar sosial sebanyak 15 indikator dan indikator hukum dan tata kelola sebanyak 5 indikator.

Grafik 2.22
Jumlah Indikator Pada Setiap Pilar yang tidak atau belum ada data untuk target nasional



Gambaran capaian dan rincian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.29 berikut:

Tabel 2.28
Capaian Indikator TPB di Kabupaten Rote Ndao

No	Tujuan TPB	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target Nasional	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target Nasional	Indikator yang belum/ tidak memiliki data	Jumlah
1.	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun	11	3	4	18
2.	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan	3	3	5	11
3.	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia	11	8	9	28
4.	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua	6	0	7	13
5.	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan	8	4	0	12
6.	Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	3	2	7	12
7.	Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua	0	0	1	1

No	Tujuan TPB	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target Nasional	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target Nasional	Indikator yang belum/ tidak memiliki data	Jumlah
8.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerjaya yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua	7	4	8	19
9.	Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi	2	1	6	9
10.	Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara	1	4	3	8
11.	Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan	2	1	3	6
12.	Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan	0	0	2	2
13.	Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya	0	0	1	1
14.	Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan	2	0	0	2
15.	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan	0	1	2	3

No	Tujuan TPB	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target Nasional	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target Nasional	Indikator yang belum/ tidak memiliki data	Jumlah
	kehilangan keanekaragaman hayat				
16.	Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua Tingkatan	6	5	8	19
17.	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan	4	1	4	9
Jumlah Persen		66 38,1%	37 21,3%	70 40,4%	173 100

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan.

Pelaporan pencapaian SDG's Tahun 2024 ini diharapkan kerjasama dengan pihak non-pemerintah dalam mencapai SDGs dapat terbangun agar pencapaian target SDGs dilakukan lintas stakeholder dan bersama-sama sesuai dengan prinsip *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal). Dengan demikian, prinsip inklusif dalam pencapaian SDGs tercapai. Pencapaian target setiap indikator SDGs terkait dengan pencapaian indikator lainnya. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan atau Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan atau Goal yang lainnya. Keterkaitan antar tujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs. Untuk mengawal pencapaian SDGs, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao membangun sistem mekanisme pemantauan yang terukur, agar pemantauan bisa dilakukan dengan efisien. Selain itu, pemantauan juga diharapkan bersifat inklusif dengan melibatkan semua stakeholder baik dari pemerintah, non pemerintah, bisnis dan masyarakat.

Adapun pencapaian terhadap analisis TPB Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 dapat dilihat pada rincian penjelasan berikut:

- a) Hingga tahun 2024 pelaksanaan pencapaian TPB Kabupaten Rote Ndao telah mencapai 65 indikator yang sudah mencapai target nasional atau sebesar 37,5 % dari 173 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Rote Ndao. indikator TPB paling banyak yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional adalah tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 5 (Mencapai kesetaraan gender) dan Tujuan 8 (Pekerjaan Layak Pertumbuhan Ekonomi).
- b) Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional Tahun 2024 mencapai 37 indikator dari 173 indikator terdiri dari Tujuan 3 (Kehidupan sehat dan sejahtera) sebanyak 8 indikator, Tujuan 16 (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan) sebanyak 5 indikator, Tujuan 5, 8 dan 10 yaitu Kesetaraan Gender, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi dan Bekurangnya Kesenjangan masing-masing sebanyak 3 indikator. Tujuan 1 dan 2 (Tanpa Kemiskinan dan Tanpa Kelaparan) masing-

masing sebanyak 3 indikator, Tujuan 6 (air bersih dan sanitasi layak) sebanyak 2 indikator, Tujuan 9, 11,15 dan 17 (Industri Inovasi dan Infrastruktur, Kota dan Permukiman Berkelanjutan, Ekosistem Daratan dan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) masing-masing sebanyak 1 indikator.

- c) Kategori indikator TPB yang tidak atau belum ada data sebanyak 70 indikator yang berturut-turut dari yang terbesar angkanya terdiri atas Tujuan 3 dan 16 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera/Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), Tujuan 4 dan 6 (Pendidikan Berkualitas/Air Bersih dan Sanitasi Layak), serta tujuan-tujuan lainnya.

3.2 Rekomendasi

Dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi:

- a) Perluasan Penggunaan Teknologi

Sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao menggunakan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya.

- b) Kemitraan Multipihak

Kemitraan menjadi salah satu kunci dalam mencapai SDGs sehingga kemitraan menjadi salah satu tujuan SDGs. Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global, tingkat nasional dan daerah. Kemitraan juga menjadi penting dalam pencapaian SDGs di Kabupaten Rote Ndao. Kemitraan dibangun berdasarkan hubungan saling percaya antar stakeholder yang terdiri dari Pemerintah, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan.

- c) Penguatan Koordinasi

Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Rote

Ndao, perlu mengkoordinasikan para stakeholder dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan TPB/SDGs.

d) Mekanisme Pembiayaan Alternatif

Perlu dilakukan pengembangan mekanisme pembiayaan alternatif untuk pelaksanaan TPB/SDGs di Kabupaten Rote Ndao, agar pembiayaan SDGs tidak hanya mengandalkan dari dana pemerintah (APBN dan APBD) dan bantuan mitra pembangunan, tapi juga pembiayaan alternatif dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, filantropi, dan sumber pembiayaan pembangunan lain.

e) Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis, konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan daerah.

f) Pemberian Penghargaan Kepada Para Pihak.

Penghargaan perlu diberikan kepada organisasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan tokoh masyarakat yang menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB/SDGs. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan dibentuk oleh Tim Koordinasi TPB/SDGs.

g) Strategi Komunikasi

Sosialisasi yang intensif diperlukan agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama. Kesadaran akan SDGs perlu dibangun di tiap tingkat dari tingkat grass root hingga pemerintah daerah.

